



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2021**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BADUNG  
2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GRAFIK .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
Dasar Hukum Penyusunan.....	3
Sistematika Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten.....	4
Maksud dan Tujuan.....	5
BAB II. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	6
Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	6
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung .....	32
Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung.....	42
BAB III. PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN DANA DALAM RKPD DAN APBD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021.....	45
BAB IV. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA RKPD TAHUN 2021 .....	53
Capaian Target Kinerja RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 .....	53
Penyerapan Dana RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 .....	56
BAB V. PENUTUP .....	58
Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan .....	58
Kesimpulan Hasil Evaluasi RKPD.....	58
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
- HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021	



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan .....	7
Tabel 2.2	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung .....	32
Tabel 2.3	Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung .....	43
Tabel 2.4	Keselaranan Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 .....	44
Tabel 3.1	Perbandingan Program, Kegiatan dan Dana pada RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021, RKPD dan APBD Tahun 2021 .....	46
Tabel 4.1	Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD dan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 .....	55
Tabel 4.2	Kesimpulan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 .....	55
Tabel 4.3	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d. Triwulan IV Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 .....	56
Tabel 4.4	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021.....	57



DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
Grafik 4.1	Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 .....	53
Grafik 4.2	Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 .....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 3.1	Irisan Kesesuaian RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 dengan RKPD dan APBD Tahun 2021 .....	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung disusun untuk pencapaian pembangunan daerah yang harmonis, selaras dan seimbang sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung yang memuat tentang Visi, Misi, Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah, serta langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan tahun berikutnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai salah satu acuan dan pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Badung dengan Visi Pemerintah Kabupaten Badung adalah :

**“MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN *TRI HITA*  
KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”**

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

1. **Memantapkan arah pembangunan Badung**, artinya bahwa pembangunan daerah periode Tahun 2016-2021 diarahkan guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan periode Tahun 2010-2015 menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Bali dan agenda pembangunan nasional (9 agenda Nawacita).
2. ***Tri Hita Karana***. Secara harfiah *Tri Hita Karana* berasal dari kata (*Tri* = tiga, *Hita* = sejahtera, *Karana* = penyebab). Pada hakikatnya *Tri Hita Karana* mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya.
3. **Maju**, artinya bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk terwujudnya kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan kondisi daerah dan masyarakat kearah yang lebih baik pada berbagai bidang/sector pembangunan dan kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh, berkelanjutan dan berkeadilan.
4. **Damai**, artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseteruan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras dan agama. Damai juga mengandung arti tidak adanya kekerasan, intimidasi, distriminasi, dikotomi dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat.



5. **Sejahtera**, artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (sembilan) Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Sebagai bentuk perwujudan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk perencanaan Tahun 2021 disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 adalah :

**“AKSELERASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN SDM UNGGUL,  
PENGUATAN INFRASTRUKTUR, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP”**

Untuk mewujudkan tema tersebut, terdapat 9 Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2021, yaitu:

1. Pendidikan, Penelitian Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Kesehatan
3. Pembangunan Ekonomi
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman



6. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
7. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
8. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan
9. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dokumen perencanaan tahunan daerah yang dirumuskan ke dalam RKPD Tahun 2021 merupakan bagian dari penjabaran RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan Pasal 306 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021, yang telah melalui tahapan penyempurnaan atas kegiatan-kegiatan dari usulan masyarakat dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten serta dikoordinasikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD, RKPD Kabupaten Badung dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Rencana Kerja PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD dan sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 terhadap perencanaan Tahun 2021. RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Tahun 2021 serta sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari landasan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan evaluasi hasil RKPD periode Tahun 2021 adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan laporan evaluasi RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);





2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021;



### 1.3. Sistematika Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten.

#### BAB I. PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang Penyusunan Evaluasi Hasil RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan.

#### BAB II. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.

#### BAB III. PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN DANA DALAM RKPD DAN APBD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

Memuat tentang rekapitulasi penganggaran program dan kegiatan serta pendanaan pada RKPD dan APBD Kabupaten Badung Tahun 2021.

#### BAB IV. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA RKPD TAHUN 2021

Memuat tentang capaian target Kinerja RKPD serta Penyerapan Dana RKPD Kabupaten Kabupaten Badung Tahun 2021.

#### BAB V. PENUTUP

Memuat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan kesimpulan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021.

### 1.4. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan berlandaskan pada dokumen perencanaan daerah berupa Renstra PD, Renja PD dan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018 bertujuan untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai bentuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah direncanakan. Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang tertuang kedalam dokumen perencanaan tahunan, perlu dilakukan suatu upaya pengendalian terhadap target kinerja capaian yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terukur sesuai dengan arah tujuan pembangunan yang hendak dicapai.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penyusunan dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2021 adalah untuk :

1. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Kabupaten Badung Tahun 2021;
2. Mengetahui keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dengan hasil rencana pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2021;
3. Mengetahui pencapaian, realisasi kinerja capaian berdasarkan target pencapaian kinerja yang telah direncanakan;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana dalam perumusan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan.



## **BAB II**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Menghadapi dinamika dalam pembangunan daerah dan berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dan ditetapkan setiap tahun harus mampu menjawab terhadap target sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Untuk efektifitas pencapaian target sasaran pembangunan daerah, disusun suatu prioritas pembangunan daerah berupa program yang memiliki daya dukung dengan capaian sasaran pembangunan dalam suatu program prioritas pembangunan daerah yang disusun sebagai langkah strategis dalam suatu sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Program prioritas pembangunan daerah ditetapkan guna mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan peningkatan keunggulan kompetitif dengan berpedoman pada arah kebijakan daerah, yang diwujudkan ke dalam program prioritas dan sasaran pembangunan lima tahunan serta program prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui strategi kebijakan umum dan program pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 difokuskan pada pencapaian sasaran dari masing-masing misi yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk penjabaran terhadap visi dan misi Kepala Daerah serta dalam mewujudkan dokumen perencanaan yang baik dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, penjabaran terhadap visi dan misi disusun dengan lebih operasional sebagai acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program agar dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan lebih efektif dalam pencapaian tujuan utama pembangunan daerah. Pada tabel berikut dijelaskan hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.



**Tabel 2.1**  
**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**

<b>Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera</b>	
<b>Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama
	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya
<b>Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
<b>Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i></b>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
	6. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat.	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
	8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
	9. Menurunnya Angka Kemiskinan



<b>Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB
<b>Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	11. Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada
2. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	12. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender
<b>Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	14. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	15. Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana
<b>Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	16. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
2. Terwujudnya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas	17. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas
<b>Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya ketersediaan pangan	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani
2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing
	20. Meningkatnya kontribusi sector Pariwisata terhadap PDRB



Keterkaitan hubungan kebijakan pencapaian masing-masing misi, kemudian tujuan yang diharapkan dengan penetapan sasaran pembangunan serta strategi arah pencapaian adalah sebagai berikut :

<b>Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera</b>			
<b>Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta	1 Meningkatnya toleransi hidup beragama  2 Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mewujudkan hubungan harmonis dalam masyarakat  1 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya  2 Meningkatkan Peran Subak dalam Mengembangkan Nilai Budaya	Memperkokoh rasa kebangsaan serta adanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat.  Merevitalisasi Adat dan Budaya  Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal
<b>Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik  2 Interpretasi hasil survei kepuasan masyarakat	1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif  2 Meningkatnya Pelayanan Publik yang mudah, cepat dan aman  Interpretasi hasil rata-rata nilai SKM perangkat daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>3 Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi</p> <p>4 Memberikan kemudahan dalam berinvestasi</p> <p>5 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan non Perizinan</p> <p>6 Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi Informasi</p> <p>7 Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan dan sistem aplikasi khusus untuk mengamankan informasi dan komunikasi pimpinan di pemerintahan daerah</p>	<p>Mempercepat proses pelayanan kearsipan dan perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>1 Meningkatkan akses informasi peluang dan potensi investasi</p> <p>2 Memberikan kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan dalam berinvestasi</p> <p>1 Menyederhanakan Persyaratan dan mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>2 Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan dan Non Perizinan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi</p> <p>2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Mengatur tata kelola persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi serta kualifikasi SDM sandi</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>8 Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait di dalam pengumpulan data statistik yang akurat dan transparan</p> <p>9 Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintahan Desa berbasis IT</p> <p>10 Melaksanakan Bimtek dan pembinaan terhadap perangkat desa</p> <p>11 Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel yang demokratis</p> <p>12 Melaksanakan Bimtek PKK, BPD, LPM, Pemerintah Desa, Sistem Informasi Posyandu (SIP)</p> <p>13 Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat</p> <p>14 Melaksanakan pembinaan dan Bimtek pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan kelompok TTG</p>	<p>Meningkatkan kualitas dokumen statistik kabupaten badung dengan menyajikan data statistik yang akurat dan transparan</p> <p>Fasilitasi penggunaan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan Pemerintahan Desa</p> <p>Fasilitasi penyelenggaraan Bimtek dan pembinaan perangkat desa dalam meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan</p> <p>Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel</p> <p>Fasilitasi pembinaan dan pelatihan Lembaga Desa</p> <p>Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan</p> <p>Mendayagunakan pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan Kelompok TTG</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i></b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan profesional	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	<p>1 Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>2 Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kelitbangan</p> <p>3 Penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan</p> <p>4 Mendorong penguatan dan pengembangan Inovasi dalam pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	<p>Meningkatnya Harmonisasi antar Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia</p> <p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel di bidang kelitbangan</p> <p>Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</p> <p>Fasilitasi penguatan dan pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>5 Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel</p> <p>6 Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan</p> <p>7 Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)</p> <p>8 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana</p> <p>9 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan</p> <p>10 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Diklat/Bimtek/workshop teknis fungsional</p>	<p>Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan</p> <p>Peningkatan kinerja aparatur di Kecamatan Kuta Selatan</p> <p>Meningkatkan inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)</p> <p>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana</p> <p>1 Dilaksanakan Diklat Prajabatan bagi CPNSD</p> <p>2 Dilaksanakan Diklat Kepemimpinan</p> <p>1 Melaksanakan Bimtek Sertifikasi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah</p> <p>2 Melaksanakan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua</p> <p>3 Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>4 Melaksanakan sosialisasi Penilaian Kinerja Berbasis Aplikasi (E-Kinerja)</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>5 Melaksanakan Workshop Pengukuran Indek profesional ASN</p> <p>6 Melaksanakan diklat revolusi mental dalam membangun karakter pemimpin yang melayani</p> <p>7 Melaksanakan diklat/bimtek/workshop teknis Fungsional sesuai kebutuhan Perangkat daerah</p> <p>8 Melaksanakan Bimtek tingkat menengah pengadaan barang/jasa pemerintah</p> <p>9 Melaksanakan workshop analisa kebutuhan diklat</p> <p>10 Melaksanakan Bimtek pengelolaan informasi publik</p> <p>11 Melaksanakan Diklat dasar POL-PP</p> <p>12 Melaksanakan penilaian Potensi dan kompotensi ASN</p> <p>13 Pelayanan administrasi ijin belajar dan atau tugas belajar</p>
		11 Peningkatan pelayanan administrasi jabatan fungsional	Usulan kepangkatan jabatan fungsional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>12 Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi</p> <p>13 Meningkatkan Pembinaan dan Penangan Kasus-Kasus</p> <p>14 Melaksanakan Monitoring dan Penilaian Kinerja Aparatur</p> <p>15 Peningkatan pelayanan administrasi mutasi Aparatur</p> <p>16 Peningkatan pelayanan administrasi pensiun</p> <p>17 Meningkatkan pelayanan seleksi administrasi Penyesuaian ijasah</p> <p>18 Meningkatkan pelayanan Penghargaan Satya Lencana</p> <p>19 Meningkatkan pelayanan administrasi pengukuhan gelar pendidikan</p> <p>20 Meningkatkan Sistem manajemen kepegawaian</p>	<p>Pengisian jabatan dengan melakukan seleksi pejabat oleh Tim Pansel dan Bupati</p> <p>Memberikan pembinaan ke OPD dan sekolah untuk mengurangi tindakan melanggar disiplin</p> <p>Melakukan Monitoring dan Penilaian Kinerja Aparatur</p> <p>Usulan naik pangkat dengan paper list</p> <p>Usulan administrasi pensiun dengan sistem paper list</p> <p>Melakukan pengembangan karier aparatur</p> <p>Melakukan jemput bola terhadap penghargaan yang diberikan oleh Presiden</p> <p>Melakukan pengembangan karier aparatur</p> <p>Sistem informasi kepegawaian berbasis web</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>21 Penetapan Formasi Kepegawaian</p> <p>22 Meningkatkan Pelayanan Rekrutmen CPNSD</p> <p>23 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur</p> <p>24 Pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kendaraan Dinas dan gedung kantor</p> <p>25 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor</p> <p>26 Nilai Akuntabilitas kinerja yang baik</p> <p>27 Dokumen perencanaan dikirim tepat waktu</p> <p>28 Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat</p> <p>29 Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah</p>	<p>Dokumen penetapan Formasi kepegawain dilaporkan MENPAN RB</p> <p>Rekrutmmen CPNSD dengan sistem Computer Assesment Tes (CAT)</p> <p>Tertib administrasi kepegawaian</p> <p>Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran</p> <p>Peningkatan kualitas perlengkapan dan peralatan kantor</p> <p>Penyusunan AKIP</p> <p>Penyusunan Renstra, Renja, RKA</p> <p>Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan</p> <p>Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>30 Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah.</p> <p>31 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang baik</p> <p>32 Tersedianya Koran dan Majalah pada sekretariat Daerah</p> <p>33 Meningkatkan Performance Karyawan Bagian Kehumasan</p> <p>34 Meningkatkan komonikasi dengan media masa</p> <p>35 Meningkatkan Kualitas SDM Kehumasan</p> <p>36 Meningkatkan kualitas informasi</p>	<p>1 Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah</p> <p>2 Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah</p> <p>1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bintek</p> <p>2 Melakukan Evaluasi Laporan SKPD Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pendistribusian Koran dan Majalah tepat waktu</p> <p>Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pelaksanaan Tugas Kehumasan</p> <p>Terjalinnya komonikasi dan kerajama dengan media masa</p> <p>Meningkatnya Kemampuan SDM di Bidang Kehumasan</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan informasi</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	<p>37 Meningkatnya informasi kegiatan yang dipublikasikan</p> <p>38 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>39 Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Pengembangan Sistem Pengadaan Barang / Jasa</p> <p>1 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>2 Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah .</p> <p>3 Meningkatkan kualitas SDM Pengurus dan penyimpan Barang di Masing-masing PD</p> <p>4 Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan yang terintegrasi</p>	<p>Meningkatnya informasi dan kegiatan yang dipublikasikan</p> <p>Pengembangan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Memperbaharui sistem teknologi dan informasi pengadaan barang/jasa</p> <p>1 Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).</p> <p>2 Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada unit kerja sesuai dengan Peraturan yang berlaku</p> <p>Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur</p> <p>Menfasilitasi pelaporan serapan belanja APBD</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3 Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	<p>5 Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan</p> <p>6 Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan LPSE</p> <p>7 Peningkatan kualitas SDM dan manajemen</p> <p>1 Meningkatkan Penerapan Pelaksanaan SPIP di Masing - masing Perangkat Daerah</p> <p>2 Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan Quality Assurance dan Quality Control serta Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan</p>	<p>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan</p> <p>Menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan</p> <p>Pembinaan dan pelatihan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik</p> <p>1 Menumbuhkan Pemahaman SPIP pada setiap Aparatur di Masing - masing Perangkat Daerah</p> <p>2 Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola dan penerapan sistem pengawasan</p> <p>Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1 Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia  2 Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal   3 Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas  4 Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat  5 Meningkatkan pengendalian penyakit Menular dan penyakit tidak menular  6 Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan yang berkualitas	Meningkatkan akses pembangunan manusia yang berkualitas  1 Menuntaskan dan memantapkan program wajib belajar 12 tahun  2 Memantapkan tata kelola pendidikan  3 Memantapkan kemampuan fisik dan mental peserta didik  Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care). dengan melibatkan peran serta masyarakat  Peningkatan surveilans gizi, peningkatan akses dan mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi  Peningkatan upaya preventif dan promotif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular  1 Peningkatan Kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2 Meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat	<p>7 Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</p> <p>8 Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.</p> <p>9 Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.</p> <p>10 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi</p> <p>1 Mewujudkan tingkat kebahagiaan masyarakat</p>	<p>2 Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta</p> <p>3 Pembangunan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan</p> <p>4 Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.</p> <p>5 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit</p> <p>Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)</p> <p>Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.</p> <p>Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).</p> <p>Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi</p> <p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebahagiaan hidup</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3 Menurunnya angka kemiskinan	<p>2 Peningkatan mutu pendidikan</p> <p>1 Memperluas Akses Kesejahteraan Sosial</p> <p>2 Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial</p> <p>3 Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial</p> <p>4 Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</p> <p>5 Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat</p> <p>6 Peningkatan Kualitas RTLH dengan memfasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas Rumah Swadaya atau Program Bedah Rumah</p>	<p>Meningkatkan kualitas pendidik, peserta didik dan sarana prasarana pendidikan</p> <p>Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial</p> <p>Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya</p> <p>Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial</p> <p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peranserta masyarakat untuk sadar gizi</p> <p>1 Alokasi Anggaran Bedah Rumah dan Peningkatan Kualitas menjadi Rumah Sehat</p> <p>2 Pengendalian titik- titik permukiman kumuh</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing UMKM</li> <li>2 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi</li> <li>3 Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri</li> </ol>	<p>Peningkatan kualitas UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing</p> <p>Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing</p> <p>Membuka akses jaringan kerja sama</p>
<b>Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan pemahaman masyarakat akan materi/isi Perda dan Perkada</li> <li>2 Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada</li> <li>3 Melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum</li> </ol>	<p>Meningkatkan Bimbingan dan Penyuluhan tentang Perda dan Perkada</p> <p>Mengefektifkan forum-forum masyarakat serta melaksanakan sosialisasi dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada</p> <p>Penegakan Hukum</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2 Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	1 Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan
2 Terwujudnya Pengarusutamaan	1 Meningkatnya pengarusutamaan gender	2 Mengefektifkan pemantauan oleh Tim Penegak Perda dan Perkada 3 Melaksanakan Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah 1 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Mengefektifkan sosialisasi Perda dan Perkada Penegakan Hukum Peningkatan kualitas hidup perempuan
<b>Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana</b>			
1 Terwujudnya pemanfaatan	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup 2 Pemantauan kualitas sanitasi dasar dan lingkungan pemukiman 3 Mengintensifkan pola tanam	Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah. Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak Memantapkan program intensifikasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Terwujudnya penanggulangan bencana secara	2 Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	<p>1 Penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>2 Pemenuhan SPM bidang Perumahan</p> <p>3 Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada korban bencana</p>	<p>1 Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan</p> <p>2 Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan</p> <p>3 Peningkatan kuantitas dan kualitas TRC yang memadai.</p> <p>4 Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat</p> <p>5 Penanganan pasca bencana yang komprehensif</p> <p>6 Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana</p> <p>7 Peningkatan SDM Rumah Sakit</p> <p>Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya</p> <p>Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	1 Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja  2 Meningkatkan kualitas Lembaga pelatihan kerja (LPK) dan assesor   3 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan  4 Mengembangkan potensi kewirausahaan   5 Melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri	Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi  1 Pelaksanaan Akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Kabupaten Badung  2 Meningkatkan jumlah dan kualitas assesor  Optimalisasi Pembinaan hubungan industrial berorientasi pada Tripartite  1 Mengintensifkan pelatihan pencari kerja dan tenaga kerja  2 Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing  3 Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan  Membuka akses kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	2 Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	<p>6 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)</p> <p>7 Memfasilitasi dengan para pelaku usaha untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal</p> <p>8 Meningkatnya kualitas SDM pariwisata</p> <p>9 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi</p> <p>1 Membangun, meningkatkan dan mempreservasi jalan dan jembatan di Kabupaten Badung, Mengembangkan Sumber Daya Air dan sanitasi melalui Peningkatan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian</p> <p>2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola Dinas Perhubungan</p> <p>3 Meningkatkan kelancaran ketertiban dan keselamatan lalu lintas</p>	<p>Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah</p> <p>Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata</p> <p>Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi</p> <p>Pembangunan infrastruktur adalah mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata</p> <p>Tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan serta disiplin pengelolaan pegawai pada Dinas Perhubungan</p> <p>Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4 Pembangunan sarana Prasarana dasar perumahan dan permukiman  5 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana teknologi informasi sesuai dengan perkembangan pertumbuhan.	Mewujudkan Lingkungan Yang sehat dan Nyaman didukung PSU yang memadai  Mengembangkan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk menunjang percepatan pembangunan daerah Kabupaten Badung
<b>Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatnya ketersediaan pangan	1 Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	1 Penelitian dan pengkajian potensi baru produksi dan produktivitas pertanian  2 Memetakan potensi pertanian ,perkebunan dan peternakan di Kabupaten Badung  3 Penerapan usaha tani secara berkelanjutan  4 Meningkatkan adopsi inovasi pertanian  5 Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis (pertanian kontemporer)	Mengintensifkan penelitian dan pengembangan hasil pertanian dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Badung  Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah  Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah  Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian  Memperkuat ekonomi subak sebagai unit produksi, unit agribisnis dan agroindustri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>6 Mendorong terserapnya produk pertanian kabupaten badung oleh sektor pariwisata.</p> <p>7 Memantapkan ketahanan pangan keluarga</p> <p>8 Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan</p> <p>9 Memantapkan model pertanian perkotaan dengan inovasi hidroponik</p> <p>10 Pengembangan teknologi peternakan</p> <p>11 Mengembangkan peternakan berdasarkan potensi wilayah</p> <p>12 Memetakan potensi Perikanan di Kabupaten Badung</p> <p>13 Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan</p>	<p>Membuka akses pemasaran produk Pertanian badung kepada sektor Pariwisata.</p> <p>Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pekarangan. dan lahan tidak produktif untuk mendukung pangan keluarga</p> <p>Mengembangkan demplot Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan</p> <p>Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming)</p> <p>Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging</p> <p>Memetakan potensi peternakan di Kabupaten Badung</p> <p>Mengembangkan Perikanan berdasarkan potensi wilayah</p> <p>1 Meningkatkan produksi perikanan</p> <p>2 Meningkatkan produksi olahan hasil perikanan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Meningkatkan daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	2 Meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing	1 Melaksanakan penataan kawasan dan DTW	1 Penyusunan database DTW 2 Pembangunan daya tarik wisata baru 3 Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana masing - masing DTW
	3 Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	2 Menetapkan kelembagaan pengelola DTW 1 Meningkatkan kualitas industri pariwisata 2 Memetakan potensi Perikanan di Kabupaten Badung 3 Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan	1 Perbaikan manajemen pengelolaan DTW 2 Peningkatan SDM pengelola DTW 1 Percepatan sertifikasi usaha sarana pariwisata 2 Kajian dan penyusunan database industri pariwisata berbasis IT 3 Peningkatan industri pariwisata berbasis lingkungan 4 Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Mengembangkan Perikanan berdasarkan potensi wilayah Meningkatkan produksi perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4 Meningkatkan akses pelayanan pada kelompok masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan tata kelola jaringan pada kelompok masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

## 2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan Visi dan Misi yang telah diuraikan, maka disusun program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan dari misi-misi yang telah ditetapkan.

Perumusan program prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 sebagaimana pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Prioritas Pembangunan Daerah**

[illegible]



		<ul style="list-style-type: none"><li>• PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</li><li>• PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</li><li>• PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</li><li>• PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</li><li>• PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</li><li>• PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</li><li>• PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</li><li>• PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</li><li>• PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</li><li>• PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</li><li>• PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</li></ul>	
--	--	---	--



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</li> <li>• PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</li> <li>• PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</li> <li>• PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</li> <li>• PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</li> </ul>	<p>2.DINAS PERINAKER</p> <p>3.DPM PTSP</p> <p>4.SETDA</p>
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</li> <li>• PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</li> </ul>	<p>1. INSPEKTORAT</p> <p>2.BPKAD</p>





		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</li> <li>• PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</li> <li>• PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</li> <li>• PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</li> <li>• PROGRAM PENCATATAN SIPIL</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</li> </ul>	<p>3.BAPENDA</p> <p>4.BKPSDM</p> <p>5.SETDA (BAGIAN ORGANISASI)</p> <p>6.DINAS DUKCAPIL</p>
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</i></li> <li>• <i>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM *)</i></li> </ul>	1.DINAS PUPR



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</li> <li>• PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</li> <li>• PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</li> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</li> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</li> <li>• <i>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN *)</i></li> <li>• PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH</li> <li>• PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</li> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</li> </ul>	<p>2.DINAS PRKP</p> <p>3.DISHUB</p>
--	--	---	-------------------------------------



6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</li> <li>• PROGRAM REHABILITASI SOSIAL *)</li> <li>• PROGRAM PENANGANAN BENCANA *)</li> <li>• PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</li> <li>• PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</li> <li>• PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</li> </ul>	<p>1.DINAS SOSIAL</p> <p>2.DINAS PPKBP3A</p>
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</li> <li>• PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</li> <li>• PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</li> </ul>	<p>1.DINAS PUPR</p> <p>2.DLHK</p>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</li><li>• PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</li><li>• PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</li><li>• PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</li><li>• PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</li><li>• PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</li></ul>	3.SETDA (BAGIAN SDA)
--	--	--	-------------------------



8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</li> <li>• PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</li> <li>• PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</li> <li>• PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</li> <li>• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</li> <li>• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</li> <li>• PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</li> <li>• PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</li> <li>• PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</li> </ul>	<p>1.DIPARDA</p> <p>2.DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>3.DINAS KEBUDAYAAN</p>
---	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</li> </ul>	
9	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM *)</li> <li>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA*)</li> <li>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM *)</li> <li>PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN</li> <li>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</li> <li>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</li> <li>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</li> </ul>	<p>1.SATPOL PP</p> <p>2.BPBD</p> <p>3.DINAS KEBAKATAN DAN PENYELAMATAN</p> <p>4.BADAN KESBANG POL</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</li> <li>• PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</li> </ul>	
--	--	--	--

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan 9 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakannya melalui 96 Program Pembangunan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- Prioritas 1 dilaksanakan dalam 10 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 2 dilaksanakan dalam 6 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 3 dilaksanakan dalam 19 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 4 dilaksanakan dalam 12 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 5 dilaksanakan dalam 12 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 6 dilaksanakan dalam 7 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 7 dilaksanakan dalam 10 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 8 dilaksanakan dalam 11 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 9 dilaksanakan dalam 9 Program Pembangunan Daerah

**2.3. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung**

Sesuai dengan amanat Pasal 306 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dikatakan bahwa Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten mempunyai suatu keterkaitan satu dengan yang lainnya.



Terhadap hal tersebut bahwasanya Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung yang tersusun dalam dokumen RKPD Tahun 2021 sudah mencerminkan keterkaitan tersebut.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan tersebut dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Keterkaitan antara**  
**Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung**

NO.	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
1	Pangan, Sandang dan Papan	3. Pembangunan Ekonomi 8. Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan
2	Kesehatan dan Pendidikan	1. Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2. Kesehatan
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	6. Perlindungan Sosial Dan Pengarusutamaan Gender
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	8. Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan
5	Pariwisata	8. Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan
6	Penguatan Infrastruktur	5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan Dan Permukiman 7. Penataan ruang dan lingkungan hidup.
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 9. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dari 9 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 secara keseluruhan telah mendukung 7 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali.





**Tabel 2.4**  
**Keselarsan Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung**  
**Tahun 2021**

TEMA PROVINSI	TEMA KABUPATEN BADUNG
“PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BALI DIDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MENUJU PEMERATAAN”	“AKSELERASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN SDM UNGGUL, PENGUATAN INFRASTRUKTUR, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP”



### **BAB III**

## **PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN DANA DALAM RKPD DAN APBD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021, dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Perumusan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 dilaksanakan melalui berbagai tahapan diantaranya pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan kemudian ditindaklanjuti pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah sampai dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung, yang memuat data dan informasi daerah yang relevan dengan arah kebijakan yang akan direncanakan termasuk didalamnya masalah kebijakan kerangka ekonomi daerah dan pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 yang tersebar diseluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung. Dari pelaksanaan 9 prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 dijabarkan ke dalam 180 program pembangunan daerah. Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 menjadi pedoman didalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Terkait dengan tahapan proses perencanaan tersebut, perbandingan antara program, kegiatan dan dana dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021, RKPD dan APBD Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.1  
Perbandingan Program, Kegiatan dan Dana  
pada RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016 - 2021,  
P RKPD dan P APBD Tahun Anggaran 2021

KODE			RPJMD 2016-2021		P RKPD T.A 2021		P APBD T.A 2021	
			JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
1		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		-		698.280.077.433,74		685.584.864.898
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 01	Pendidikan		-		690.730.389.903,74		677.463.190.844
		Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		3 8 81		3 8 81	
2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2 13	Kepemudaan dan Olah Raga		-		7.549.687.530,00		8.121.674.054
		Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		3 6 0		3 6 0	
		Dinas Kesehatan		-		366.248.716.327,00		753.743.847.600
3		Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 02	Kesehatan		-		366.248.716.327,00		753.743.847.600
		Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		5 14 76		5 14 76	
		Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada		-		295.231.145.435,65		-
4		Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 02	Kesehatan		-		295.231.145.435,65		
		Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		2 4 10		2 4 10	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		-		131.591.481.426,20		155.783.871.775
5		Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		-		131.591.481.426,20		155.783.871.775
		Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		9 17 75		9 17 75	
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		-		11.292.919.653,20		11.276.722.943
6		Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		-		11.292.919.653,20		11.276.722.943
		Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		4 7 24		4 7 24	
		Satuan Polisi Pamong Praja		-		28.792.482.963,62		28.790.662.656
7		Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		-		28.792.482.963,62		28.790.662.656
		Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		2 6 25		2 6 25	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		-		11.710.136.164,00		11.124.057.879
8		Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		-		11.710.136.164,00		11.124.057.879
		Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		2 5 33		2 5 33	
		Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		-		38.250.027.861,00		37.781.602.536
9		Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		-		38.250.027.861,00		37.781.602.536
		Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		2 7 29		2 7 29	
		Dinas Sosial		-		36.719.207.420,40		36.679.376.502
10		Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 06	Sosial		-		36.719.207.420,40		36.679.376.502
		Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		4 10 32		4 10 32	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		-		87.412.965.512,15		87.772.840.898
11		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2 05	Lingkungan Hidup		-		87.412.965.512,15		87.772.840.898
		Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		9 12 36		9 12 36	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		-		14.998.775.359,00		14.884.187.972
12		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2 06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		-		14.998.775.359,00		14.884.187.972
		Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		5 9 29		5 9 29	
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		-		11.979.066.058,10		12.132.427.631
12		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		-		11.979.066.058,10		12.132.427.631
		Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		4 6 28		4 6 28	

KODE			PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2016-2021		P RKPD T.A 2021		P APBD T.A 2021	
				JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
13			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		-		19.110.616.733,00		17.609.343.385
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		-				
	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		-		13.709.349.502,00		13.613.962.953
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		7 13 0		7 13 0	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		-				
	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		-		5.401.267.231,00		3.995.380.432
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		3 8 48		3 8 48	
14			Dinas Perhubungan		-		58.081.147.855,54		56.668.365.455
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		-				
	2	09	Perhubungan		-		58.081.147.855,54		56.668.365.455
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		2 14 45		2 14 45	
15			Dinas Komunikasi dan Informatika		-		46.859.674.395,85		46.576.550.075
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		-				
	2	10	Komunikasi dan Informatika		-		46.823.826.816,65		46.546.632.168
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		3 19 49		3 19 49	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		-				
	2	14	Statistik		-		13.028.999,20		10.133.864
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		1 1 0		1 1 0	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		-				
	2	15	Persandian		-		22.818.580,00		19.784.043
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		1 2 0		1 2 0	
16			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		-		11.953.631.932,00		12.086.004.819
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		-				
	2	11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		-		11.584.512.779,00		11.677.696.844
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		7 9 39		7 9 39	
	3		Urusan Pilihan		-				
	3	06	Perdagangan		-		369.119.153,00		408.307.975
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		6 7 0		6 7 0	
17			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		-		23.730.956.005,33		23.635.945.584
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		-				
	2	12	Penanaman Modal		-		23.730.956.005,33		23.635.945.584
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		6 9 35		6 9 35	
18			Dinas Kebudayaan		-		91.590.630.409,41		90.456.707.877
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		-				
	2	16	Kebudayaan		-		91.590.630.409,41		90.456.707.877
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		5 10 29		5 10 29	
19			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		-		14.258.457.487		14.129.321.056
	2		Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		-				
	2	17	Urusan Perpustakaan		-		13.674.858.895,00		13.547.293.056
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		3 6 0		3 6 0	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		-				
	2	18	Kearsipan		-		583.598.592,00		582.028.000
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		1 3 35		1 3 35	
20			Dinas Perikanan		-		9.839.472.275,01		9.367.769.949
	3		Urusan Pilihan		-				
	3	01	Kelautan dan Perikanan		-		9.839.472.275,01		9.367.769.949
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		5 11 37		5 11 37	
21			Dinas Pariwisata		-		22.717.126.640,10		23.379.404.632
	3		Urusan Pilihan		-				
	3	02	Pariwisata		-		22.717.126.640,10		23.379.404.632
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	0		4 8 32		4 8 32	

KODE		PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2016-2021		P RKPD T.A 2021		P APBD T.A 2021	
			JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
22		Dinas Pertanian dan Pangan		-		44.143.046.498,95		43.847.374.276
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2 03	Pangan		-		979.804.094,00		979.454.094
		Program	0		2		2	
		Kegiatan			3		3	
		Sub Kegiatan			0		0	
	3	Urusan Pilihan						
	3 03	Pertanian		-		43.163.242.404,95		42.867.920.182
		Program	0		6		6	
		Kegiatan			16		16	
		Sub Kegiatan			45		45	
23		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		-		11.234.301.425,00		11.121.800.654
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2 01	Tenaga Kerja		-		639.979.518,00		554.504.894
		Program	0		4		4	
		Kegiatan			7		7	
		Sub Kegiatan			0		0	
	3	Urusan Pilihan						
	3 07	Perindustrian		-		10.594.321.907,00		10.567.295.760
		Program	0		2		2	
		Kegiatan			4		4	
		Sub Kegiatan			30		30	
24		Sekretariat Daerah		#REF!		181.442.894.215,95		215.184.654.487,00
		a. Bagian Kesejahteraan Rakyat		-		4.428.045.787,00		798.016.062
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		-		4.428.045.787,00		798.016.062
		Program	0		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			3		3	
		b. Bagian Pemerintahan		-		2.311.345.442,00		6.959.816.789
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2 10	Pertanahan		-		166.967.091,00		677.882.091
		Program	0		3		3	
		Kegiatan			4		4	
		Sub Kegiatan			0		0	
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		-		1.766.530.660,00		5.904.087.007
		Program	0		1		1	
		Kegiatan			2		2	
		Sub Kegiatan			10		10	
	7	Unsur Kewilayahan						
	7 01	Unsur Kewilayahan		-		377.847.691,00		377.847.691
		Program	0		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			0		0	
		c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		-		13.145.183.626,00		9.937.663.060
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		-		13.145.183.626,00		9.937.663.060
		Program	0		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			2		2	
		d. Bagian Hukum		-		5.403.035.669,00		5.403.035.669
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		-		5.403.035.669,00		5.403.035.669
		Program	0		1		1	
		Kegiatan			2		2	
		Sub Kegiatan			3		3	
		e. Bagian Sumber Daya Alam		-		92.670.243,90		508.255.788
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		-		92.670.243,90		508.255.788
		Program	0		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			3		3	
		f. Bagian Perekonomian		-		160.875.018,00		808.027.532
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		-		160.875.018,00		808.027.532
		Program	0		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			3		3	
		g. Bagian Administrasi Pembangunan		-		649.153.250,00		2.933.428.407
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		-		649.153.250,00		2.933.428.407
		Program	0		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			3		3	
		h. Bagian Pengadaan Barang / Jasa		-		252.623.580,05		899.493.822
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		-		252.623.580,05		899.493.822
		Program	0		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			3		3	
		i. Bagian Organisasi		-		368.235.417,00		722.017.017
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		-		368.235.417,00		722.017.017
		Program	0		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			3		3	

KODE			PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2016-2021		P RKPD T.A 2021		P APBD T.A 2021	
				JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
	4		j. Bagian Umum		-		94.170.921.414,00		54.995.895.703
			Unsur Pendukung						
	4	01	Unsur Pendukung		-		94.170.921.414,00		54.995.895.703
			Program	0		1		1	
			Kegiatan			6		6	
			Sub Kegiatan			14		14	
	4		k. Bagian Perencanaan dan Keuangan		-		60.340.288.359,00		79.349.124.415
			Unsur Pendukung						
	4	01	Unsur Pendukung		-		60.340.288.359,00		79.349.124.415
			Program	0		1		1	
			Kegiatan			4		4	
			Sub Kegiatan			8		8	
	4		l. Bagian Kerjasama		-		120.516.410,00		51.869.880.223
			Unsur Pendukung						
	4	01	Unsur Pendukung		-		120.516.410,00		51.869.880.223
			Program	0		1		1	
			Kegiatan			1		1	
			Sub Kegiatan			18		18	
25			Sekretariat DPRD		-		97.096.693.135,40		87.116.791.188
	4		Unsur Pendukung						
	4	01	Unsur Pendukung		-		97.096.693.135,40		87.116.791.188
			Program	0		2		2	
			Kegiatan			12		12	
			Sub Kegiatan			56		56	
26			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		-		11.990.242.973,00		14.301.108.357
	4		Unsur Penunjang						
	4	03	Perencanaan		-		11.990.242.973,00		14.301.108.357
			Program	0		5		5	
			Kegiatan			15		15	
			Sub Kegiatan			44		44	
27			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		-		333.312.470.307,80		584.257.796.377
	4		Unsur Penunjang						
	4	04	Keuangan		-		333.312.470.307,80		584.257.796.377
			Program	0		3		3	
			Kegiatan			11		11	
			Sub Kegiatan			73		73	
28			Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung		-		78.906.020.355,20		78.308.383.669
	4		Unsur Penunjang						
	4	04	Keuangan		-		78.906.020.355,20		78.308.383.669
			Program	0		2		2	
			Kegiatan			7		7	
			Sub Kegiatan			28		28	
29			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		-		18.401.290.941,00		17.738.268.152
	4		Unsur Penunjang						
	4	05	Kepegawaian dan Pelatihan		-		15.802.390.738,00		15.613.927.658
			Program	0		2		2	
			Kegiatan			8		8	
			Sub Kegiatan			36		36	
	4	05	Pendidikan dan Pelatihan		-		2.598.900.203,00		2.124.340.494
			Program	0		1		1	
			Kegiatan			1		1	
			Sub Kegiatan			0		0	
30			Badan Penelitian dan Pengembangan		-		9.283.399.291,18		8.790.460.742
	4		Unsur Penunjang						
	4	07	Unsur Pemerintahan Daerah		-		9.283.399.291,18		8.790.460.742
			Fungsi Penelitian dan Pengembangan						
			Program	0		2		2	
			Kegiatan			6		6	
			Sub Kegiatan			35		35	
31			Inspektorat		-		17.961.822.846,15		17.568.773.135
	6		Unsur Pengawasan						
	6	01	Inspektorat		-		17.961.822.846,15		17.568.773.135
			Program	0		3		3	
			Kegiatan			7		7	
			Sub Kegiatan			33		33	
32			Kecamatan Kuta		-		19.381.492.567,58		19.118.644.539
	7		Unsur Wilayah						
	7	01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		-		19.381.492.567,58		19.118.644.539
			Program	0		5		5	
			Kegiatan			9		9	
			Sub Kegiatan			27		27	
33			Kecamatan Kuta Utara		-		17.754.564.085,07		17.446.448.922
	7		Unsur Wilayah						
	7	01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		-		17.754.564.085,07		17.446.448.922
			Program	0		6		6	
			Kegiatan			11		11	
			Sub Kegiatan			33		33	
34			Kecamatan Kuta Selatan		-		15.223.542.661,00		14.952.070.759
	7		Unsur Wilayah						
	7	01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		-		15.223.542.661,00		14.952.070.759
			Program	0		6		6	
			Kegiatan			11		11	
			Sub Kegiatan			32		32	

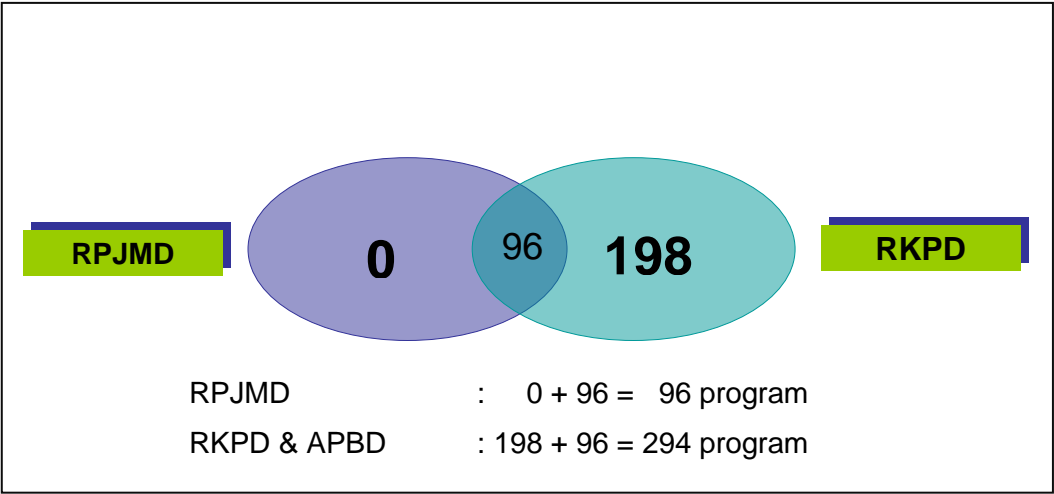
KODE			PERANGKAT DAERAH		RPJMD 2016-2021		P RKPd T.A 2021		P APBD T.A 2021	
					JUMLAH	TOTAL (Rp.)	JUMLAH	TOTAL (Rp.)	JUMLAH	TOTAL (Rp.)
35	7		Kecamatan Mengwi			-		24.522.941.982,00		24.319.615.788
	7	01	Unsur Kewilayahan			-				
			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)			-		24.522.941.982,00		24.319.615.788
			Program	0			6		6	
			Kegiatan				10		10	
			Sub Kegiatan				30		30	
36	7		Kecamatan Abiansemai			-		9.867.051.058,00		9.638.821.185
	7		Unsur Kewilayahan			-				
	7	01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)			-		9.867.051.058,00		9.638.821.185
			Program	0			5		5	
			Kegiatan				9		9	
			Sub Kegiatan				29		29	
37	7		Kecamatan Petang			-		9.030.182.466,00		8.732.272.192
	7		Unsur Kewilayahan			-				
	7	01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)			-		9.030.182.466,00		8.732.272.192
			Program	0			6		6	
			Kegiatan				9		9	
			Sub Kegiatan				30		30	
38	8		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			-		10.980.881.030,00		10.804.092.486
	8		Unsur Pemerintahan Umum			-				
	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik			-		10.980.881.030,00		10.804.092.486
			Pelindungan Masyarakat							
			Program	0			6		6	
			Kegiatan				8		8	
			Sub Kegiatan				27		27	
NB			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		0		33		33	
			Jumlah Program				78		78	
			Jumlah Kegiatan				385		385	
			Jumlah Sub Kegiatan							
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		0		69		69	
			Jumlah Program				141		141	
			Jumlah Kegiatan				373		373	
			Jumlah Sub Kegiatan							
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		0		23		23	
			Jumlah Program				46		46	
			Jumlah Kegiatan				144		144	
			Jumlah Sub Kegiatan							
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		0		14		14	
			Jumlah Program				34		34	
			Jumlah Kegiatan				129		129	
			Jumlah Sub Kegiatan							
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH		0		15		15	
			Jumlah Program				48		48	
			Jumlah Kegiatan				216		216	
			Jumlah Sub Kegiatan							
			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		0		3		3	
			Jumlah Program				7		7	
			Jumlah Kegiatan				33		33	
			Jumlah Sub Kegiatan							
			UNSUR KEWILAYAHAN		0		35		35	
			Jumlah Program				60		60	
			Jumlah Kegiatan				181		181	
			Jumlah Sub Kegiatan							
			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		0		6		6	
			Jumlah Program				8		8	
			Jumlah Kegiatan				27		27	
			Jumlah Sub Kegiatan							
			JUMLAH TOTAL PROGRAM		0		198		198	
			JUMLAH TOTAL KEGIATAN				422		422	
			JUMLAH TOTAL SUB KEGIATAN				1488		1488	

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat keterkaitan, sinkronisasi dan keselarasan antara dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 dengan APBD Kabupaten Badung Tahun 2021. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pelaksanaan urusan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kabupaten Badung dalam dokumen RKPD Tahun 2021 terdapat 33 program 78 kegiatan 385 sub kegiatan pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 69 program 141 kegiatan 373 sub kegiatan pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 23 program 46 kegiatan 144 sub kegiatan pada Urusan Pemerintah Pilihan, 14 program 34 kegiatan 129 sub kegiatan pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintah, 15 program 48 kegiatan 216 sub kegiatan pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintah, 3 program 7 kegiatan 33 sub kegiatan pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah, 35 program 60 kegiatan 181 sub kegiatan pada Unsur Kewilayahan, dan 6 program 8 kegiatan 27 sub kegiatan pada Unsur Pemerintahan Umum.

Serta dokumen APBD Tahun 2021 terdapat terdapat 33 program 78 kegiatan 385 sub kegiatan pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 69 program 141 kegiatan 373 sub kegiatan pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 23 program 46 kegiatan 144 sub kegiatan pada Urusan Pemerintah Pilihan, 14 program 34 kegiatan 129 sub kegiatan pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintah, 15 program 48 kegiatan 216 sub kegiatan pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintah, 3 program 7 kegiatan 33 sub kegiatan pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah, 35 program 60 kegiatan 181 sub kegiatan pada Unsur Kewilayahan, dan 6 program 8 kegiatan 27 sub kegiatan pada Unsur Pemerintahan Umum.

Mengacu pada tabel tersebut di atas, maka dapat kami gambarkan mengenai irisan kesesuaian program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dengan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 dan APBD Kabupaten Badung Tahun 2021 sebagaimana gambar berikut.

**Gambar 3.1**  
**Irisan Kesesuaian Program RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016 - 2021 dengan RKPD dan APBD Tahun 2021**





Berdasarkan irisan kesesuaian sebagaimana disajikan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2021 memuat 198 program pembangunan sesuai dengan dokumen APBD Tahun 2021. Lebih rinci dijelaskan bahwa program merupakan program prioritas penjabaran dari 9 Prioritas Pembangunan Daerah pada dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dan 198 program merupakan program pendukung pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2021. Secara total akumulasi jumlah program yang dicanangkan pada dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebanyak 96 program, sedangkan pada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 mencakup 294 program sebagai percepatan pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2021.



**BAB IV**  
**CAPAIAN TARGET KINERJA**  
**DAN PENYERAPAN DANA RKPD TAHUN 2021**

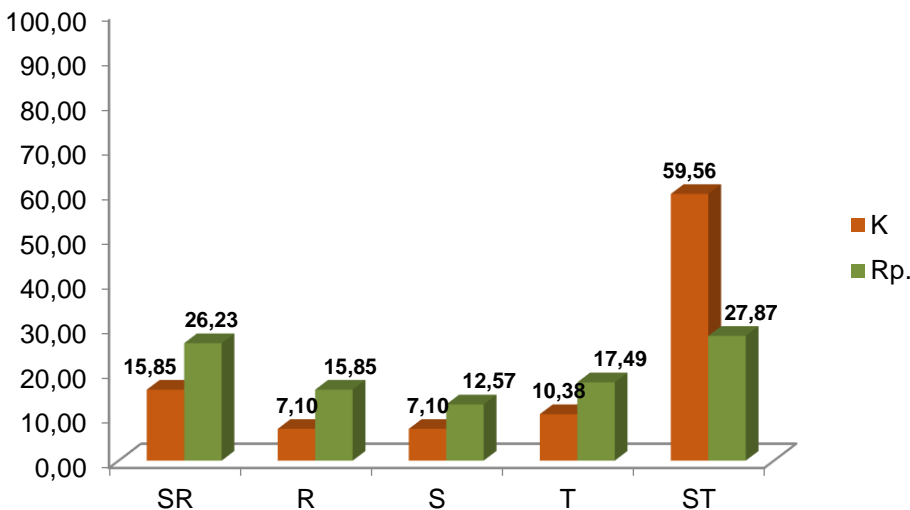
**4.1. Capaian Target Kinerja Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021**

Sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan prinsip jalinan konsepsi antara "Tri Hita Karana" dengan enam prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yaitu Pro-Pertumbuhan/*Pro-Growth*, Pro-Tenaga Kerja/*Pro-Job*, Pro-Rakyat Miskin/*Pro-Poor*, Pro-Budaya/*Pro Culture*, Pro-Lingkungan/*Pro-Environment* dan Pro-Penegakan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan/*Pro-Law Enforcement*. Keseluruhan enam prinsip dasar tersebut dituangkan ke dalam kriteria kinerja pembangunan daerah.

Kinerja pembangunan daerah sebagaimana pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, dalam bentuk indikator kinerja memberikan gambaran/informasi terhadap cara yang digunakan dalam pencapaian visi dan misi daerah, termasuk didalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021. Indikator Kinerja yang tertuang pada dokumen PRKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 memberikan gambaran terhadap target capaian kinerja sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah dan tema pembangunan daerah tahun 2021.

Sesuai dengan hasil capaian kinerja dokumen PRKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 dan terhadap capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 dapat kami sampaikan grafik dibawah ini.

**Grafik 4.1**  
**Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021**



**Keterangan :**

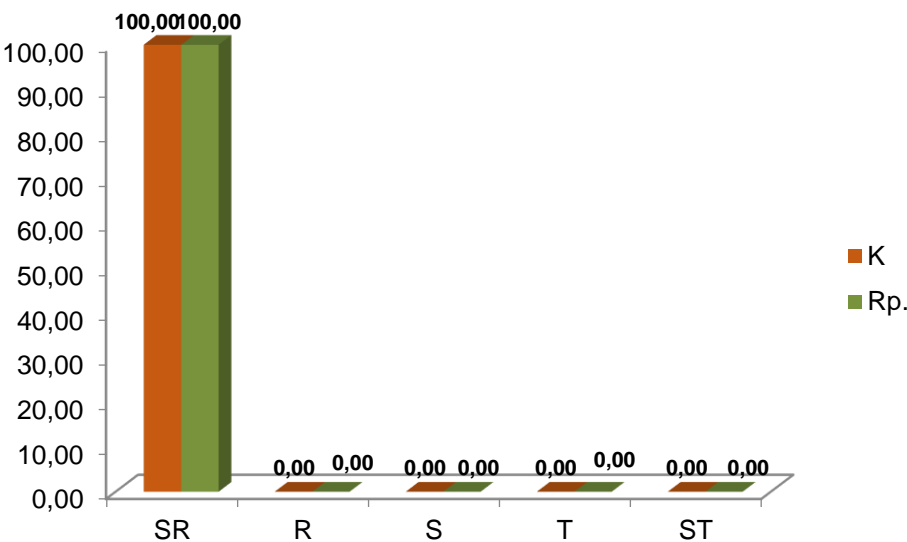
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ;

- SR : Sangat Rendah ( $\leq 50\%$ )
- R : Rendah ( $51\% \leq 65\%$ )
- S : Sedang ( $66\% \leq 75\%$ )
- T : Tinggi ( $76\% \leq 90\%$ )
- ST : Sangat Tinggi ( $91\% \leq 100\%$ )

Berdasarkan grafik 4.1 dapat diketahui bahwa persentase hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran P RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 dari seluruh program pada Perangkat Daerah didominasi oleh kategori ST (Sangat Tinggi) dengan nilai persentase kinerja sebesar 59,56% dan nilai persentase anggaran sebesar 27,87%. Sedangkan persentase kinerja terendah terdapat pada kategori S (Sedang) dengan nilai sebesar 7,10% dan persentase anggaran terendah terdapat pada kategori S (Sedang) dengan nilai sebesar 12,57%.

**Grafik 4.2**

**Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021**



**Keterangan :**

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ;

- SR : Sangat Rendah ( $\leq 50\%$ )
- R : Rendah ( $51\% \leq 65\%$ )
- S : Sedang ( $66\% \leq 75\%$ )
- T : Tinggi ( $76\% \leq 90\%$ )
- ST : Sangat Tinggi ( $91\% \leq 100\%$ )

Berdasarkan grafik 4.2 dapat diketahui bahwa persentase hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 dari seluruh program pada Perangkat Daerah didominasi oleh kategori SR (Sangat Rendah) dengan nilai persentase kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar 100%. Sedangkan persentase kinerja terendah terdapat pada kategori ST (Sangat Tinggi)



dengan nilai sebesar 0,00% dan persentase anggaran terendah terdapat pada kategori ST (Sangat Tinggi) dengan nilai sebesar 0,00%.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran**  
**P RKPD dan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung**  
**Tahun 2021**

URAIAN		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran PRKPD Tahun 2021	Kinerja	29	13	13	19	109
	Rp.	48	29	23	32	51
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021	Kinerja	183	0	0	0	0
	Rp.	183	0	0	0	0

Sumber: Lampiran Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 didominasi oleh kategori ST (Sangat Tinggi), serta hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 didominasi oleh kategori SR (Sangat Rendah).

Terhadap hal tersebut diatas dapat kami gambarkan persentase hasil evaluasi RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 dengan tingkat capaian kinerja adalah sebesar 81,46% dengan predikat Tinggi dan realisasi anggaran sebesar 66,07% dengan predikat Sedang sebagaimana pada tabel 4.2 kesimpulan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021**

No	Nama Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)	Predikat Tingkat Capaian Kinerja RKPD	Rata-rata Tingkat Capaian Realisasi RKPD (%)	Predikat Tingkat Capaian Realisasi RKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi bagi Arah Kebijakan RKPD Kabupaten/Kota berikutnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kabupaten Badung	81,46	Tinggi	66,07	Sedang			



4.2. Penyerapan Dana RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021

Terkait dengan realisasi anggaran pada RKPD Tahun 2019 sampai dengan Tahun berjalan 2021 dan proyeksi pada Tahun 2022 dapat digambarkan seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.3  
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d. Tahun 2021  
dan Proyeksi Tahun 2022

NO	Uraian				
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Proyeksi pada Tahun 2022
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Pegawai			1.074.582.058.528,00	1.533.125.256.303,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			777.063.118.436,63	650.914.420.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi			16.000.000,00	16.000.000
2.1.4	Belanja Hibah			139.484.690.895,60	82.900.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			0,00	10.900.000.000
	JUMLAH BELANJA OPERASI	0,00	0,00	1.991.145.867.860,23	2.277.855.676.303
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			87.407.881.955,00	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			32.248.398.990,90	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			9.527.441.061,40	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			6.375.000,00	
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	129.190.097.007,30	93.000.000.000
5.3	Belanja Tidak Terduga				
5.3.1	Belanja Tidak Terduga			280.107.511.462,27	
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	280.107.511.462,27	33.000.000.000
5.4	Belanja Transfer				
5.4.1	Belanja Bagi Hasil			129.490.640.940,00	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan			39.124.178.121,00	
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	168.614.819.061,00	278.000.000.000
	TOTAL JUMLAH BELANJA	0,00	0,00	2.569.058.295.390,80	2.681.855.676.303

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.

Berdasarkan data kedua tabel tersebut diatas, maka pada periode Tahun Anggaran 2021, serapan terhadap realisasi anggaran P RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.4**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan**  
**Kabupaten Badung Tahun 2021**

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
PENDAPATAN DAERAH	2.960.242.418.923,00	2.369.893.579.698,72	(590.348.839.224,28)	80,06
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.972.103.054.321,00	1.556.499.352.537,44	(415.603.701.783,56)	78,93
Pajak Daerah	1.551.126.373.370,00	1.278.719.795.701,97	(272.406.577.668,03)	82,44
Retribusi Daerah	32.798.675.000,00	41.975.477.313,00	9.176.802.313,00	127,98
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	207.068.232.154,00	206.978.872.652,02	(89.359.501,98)	99,96
Lain-lain PAD yang Sah	181.109.773.797,00	28.825.206.870,45	(152.284.566.926,55)	15,92
PENDAPATAN TRANSFER	903.634.834.602,00	808.400.490.895,25	(95.234.343.706,75)	89,46
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747.084.863.000,00	681.935.635.870,00	(65.149.227.130,00)	91,28
Pendapatan Transfer Antar Daerah	156.549.971.602,00	126.464.855.025,25	(30.085.116.576,75)	80,78
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84.504.530.000,00	4.993.736.266,03	(79.510.793.733,97)	5,91
Pendapatan Hibah	0,00	97.975.000,00	97.975.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	84.504.530.000,00	4.895.761.266,03	(79.608.768.733,97)	5,79
BELANJA DAERAH	3.268.403.627.706,00	2.569.058.295.390,80	(699.345.332.315,20)	78,60
BELANJA OPERASI	2.550.252.078.870,00	1.991.145.867.860,23	(559.106.211.009,77)	78,08
Belanja Pegawai	1.203.839.378.357,00	1.074.582.058.528,00	(129.257.319.829,00)	89,26
Belanja Barang dan Jasa	1.133.241.817.742,00	777.063.118.436,63	(356.178.699.305,37)	68,57
Belanja Subsidi	88.000.000,00	16.000.000,00	(72.000.000,00)	18,18
Belanja Hibah	185.848.882.771,00	139.484.690.895,60	(46.364.191.875,40)	75,05
Belanja Bantuan Sosial	27.234.000.000,00	0,00	(27.234.000.000,00)	0,00
BELANJA MODAL	158.956.876.514,00	129.190.097.007,30	(29.766.779.506,70)	81,27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.986.069.897,00	87.407.881.955,00	(23.578.187.942,00)	78,76
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.648.916.277,00	32.248.398.990,90	(1.400.517.286,10)	95,84
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.753.357.840,00	9.527.441.061,40	(4.225.916.778,60)	69,27
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	568.532.500,00	6.375.000,00	(562.157.500,00)	1,12
BELANJA TIDAK TERDUGA	294.566.533.858,00	280.107.511.462,27	(14.459.022.395,73)	95,09
Belanja Tidak Terduga	294.566.533.858,00	280.107.511.462,27	(14.459.022.395,73)	95,09
BELANJA TRANSFER	264.628.138.464,00	168.614.819.061,00	(96.013.319.403,00)	63,72
Belanja Bagi Hasil	164.731.305.037,00	129.490.640.940,00	(35.240.664.097,00)	78,61
Belanja Bantuan Keuangan	99.896.833.427,00	39.124.178.121,00	(60.772.655.306,00)	39,16
SURPLUS / (DEFISIT)	(308.161.208.783,00)	(199.164.715.692,08)	108.996.493.090,92	64,63
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	308.161.208.783,00	308.167.875.451,64	6.666.668,64	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	308.161.208.783,00	308.161.208.783,64	0,64	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	6.666.668,00	6.666.668,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	308.161.208.783,00	308.167.875.451,64	6.666.668,64	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENMAN	0,00	109.003.159.759,56	109.003.159.759,56	0,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Badung pada Tahun 2021, yang bersumber dari masing-masing Perangkat Daerah terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Terbatasnya kemampuan dan jumlah personil/sumber daya manusia yang ada sesuai dengan kebutuhan pada beberapa Perangkat Daerah.
2. Masih kurangnya komitmen dan koordinasi pada masing-masing Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan.

#### **5.2 Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD**

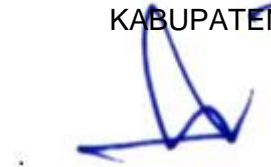
Terhadap evaluasi hasil RKPD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa:
  - a. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 mempunyai keterkaitan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
  - b. Dokumen PRKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 selaras dengan dokumen KUPA-PPASP dan PAPBD Kabupaten Badung Tahun 2021.
2. Dalam dokumen PRKPD Tahun 2021 terdapat 33 program 78 kegiatan 385 sub kegiatan pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 69 program 141 kegiatan 373 sub kegiatan pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 23 program 46 kegiatan 144 sub kegiatan pada Urusan Pemerintah Pilihan, 14 program 34 kegiatan 129 sub kegiatan pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintah, 15 program 48 kegiatan 216 sub kegiatan pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintah, 3 program 7 kegiatan 33 sub kegiatan pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah, 35 program 60 kegiatan 181 sub kegiatan pada Unsur Kewilayahan, dan 6 program 8 kegiatan 27 sub kegiatan pada Unsur Pemerintahan Umum.



3. Hasil tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 didominasi oleh kategori ST (Sangat Tinggi), serta hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 didominasi oleh kategori SR (Sangat Rendah).

Mangupura, 31 Januari 2022  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BADUNG



I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670127 199201 1 001



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Evaluasi Hasil RKPD  
Kabupaten Badung  
Tahun 2021**

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17												
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
		01	Pendidikan																									
		1 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			100 %	472.720.431.763	25	42.546.426.921	25	103.196.504.312	25	868.138.569	25	144.870.987.976	100	145.744.931.233	100	30,83	100	145.744.931.233		Disdikpora				
1	Meningkatkan Kualitas SDM	1 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LQIP		80,00																					
		1 01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		9	10.224.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						Dokumen		2	5.555.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1 01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA		2	5.555.453	-	-	-	2	4.249.100	-	-	-	2	4.249.100	100	76,49	2	4.249.100					
						Dokumen		2	5.555.453	-	-	-	2	4.249.100	-	-	-	2	4.249.100	100	76,49	2	4.249.100					
		1 01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA		2	5.555.453	-	-	-	2	4.249.100	-	-	-	2	4.249.100	100	76,49	2	4.249.100					
						Dokumen		2	5.555.453	-	-	-	2	4.249.100	-	-	-	2	4.249.100	100	76,49	2	4.249.100					
		1 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		2	16.903.043	-	-	-	2	7.775.300	-	(2.646.029)	-	-	2	5.129.271	100	30,35	2	5.129.271				
						Laporan		100	100.424.842	25	24.273.300	25	19.968.000	25	18.857.628	25	14.143.221	100	77.242.149	100	76,92	100	77.242.149					
		1 01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah		100	100.424.842	25	24.273.300	25	19.968.000	25	18.857.628	25	14.143.221	100	77.242.149	100	76,92	100	77.242.149					
						%		100	100.424.842	25	24.273.300	25	19.968.000	25	18.857.628	25	14.143.221	100	77.242.149	100	76,92	100	77.242.149					
		1 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan		100																				
						%		100																				
		1 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN		100	468.276.313.676	25	42.093.197.516	25	102.047.422.971	25	-	25	144.140.620.487	100	288.281.240.974	100	61,56	100	288.281.240.974					
						%		100	468.276.313.676	25	42.093.197.516	25	102.047.422.971	25	-	25	144.140.620.487	100	288.281.240.974	100	61,56	100	288.281.240.974					
		1 0																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100						17					
		1 02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan SD	SD	246	11.821.261.641	25	1.004.460.643	25	1.411.805.598	25	1.014.657.758	-	1.391.224.081	75	4.822.148.080	30	40,79	75	4.822.148.080						
		1 02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa SD	SD	246	1.597.591.393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		1 02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pemenuhan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	SD	100	11.323.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
							%																						
		1 02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Buku Statistik dan Buku Profile SD		100	166.131.123	25	13.312.000	25	29.952.000	25	28.286.444	25	29.252.595	100	100.803.039	100	60,68	100	100.803.039						
							%																						
							2																						
		1 02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pemenuhan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		100	96.409.760.402	25	14.577.814.000	25	23.017.005.000	25	18.612.846.616	25	13.819.391.824	100	70.027.057.440	100	72,63	75	70.027.057.440						
							%																						
		1 02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Jenis Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SD		2	987.371.339	-	-	-	-	-	-	2	44.302.000	2	44.302.000	100	4,49	2	44.302.000						
		1 02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pertanggungjawaban Rekonsiliasi Bos SD		Jenis	271	328.248.755	-	53.248.000	-	79.872.000	-	75.430.520	271	57.397.380	271	265.947.900	100	81,02	271	265.947.900					
		1 02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yg direhabilitasi		Paket	1	328.248.755	-	-	-	-	-	-	1	21.848.310	1	21.848.310	100	6,66	1	21.848.310					
		1 02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana sekolah yg direhabilitasi		1	328.248.755	-	-	-	-	-	-	-	1	5.772.800	1	5.772.800	100	1,76	1	5.772.800					
								Paket																					
		1 02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah		1	328.248.755	-	-	-	-	-	-	-	1	75.631.050	1	75.631.050	100	23,04	1	75.631.050					
								Paket																					
		1 02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan UKS			328.248.755	-	-	-	-	-	-	-	1	45.352.010	1	45.352.010	100	13,82	1	45.352.010					
								Paket																					
		1 02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan perpustakaan sekolah		1	328.248.755	-	-	-	-	-	-	-	1	71.596.250	1	71.596.250	100	21,81	1	71.596.250					
								Paket																					
		1 02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan sarana prasarana sekolah		1	328.248.755	-	-	-	-	-	-	-	1	94.047.800	1	94.047.800	100	28,65	1	94.047.800					
								Paket																					
		1 02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi ruang kelas		1	328.248.755	-	-	-	-	-	-	-	1	135.033.819	1	135.033.819	100	41,14	1	135.033.819					
								Paket																					
		1 02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi ruang guru/ kepala sekolah/ TU		1	328.248.755	-	-	-	-	-	-	-	1	19.467.910	1	19.467.910	100	5,93	1	19.467.910					
								Paket																					
		1 02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi UKS		1	328.248.755	-	-	-	-	-	-	-	1	5.321.800	1	5.321.800	100	1,62	1	5.321.800					
								Paket																					
		1 02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD Yang Menerima Dana Bos		SD	271	43.578.900.000	-	-	-	-	50	10.352.723.075	-	-	50	10.352.723.075	18	23,76	50	10.352.723.075					
		1 02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP		100																					
		1 02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB SMP Yang Di Bangun		100	149.760.000	25	16.640.000	25	24.960.000	25	23.337.628	25	17.503.221	100	82.440.849	100	55,05	100	82.440.849						
								%																					

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12								14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17			
		02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rata-rata waktu kerja penyelidikan epidemiologi KLB pada desa yang mengalami KLB.Jumlah spesimen serum suspek campak yang terkirim ke provinsi			12	1.493.060.870		1	1.200.000	1	6.657.201	1	203.836.150	3,00	211.693.351	25,00	14,18	3	211.693.351								
		02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Orang yang Dilakukan Skrining Kesehatan Jiwa			12	79.546.000	3	3.328.000	3	13.312.000	3	33.611.612	3	23.738.816	12,00	73.990.428	100,00	93,02	12	73.990.428	-	-					
		02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Desa/Kelurahan mencapai Universal Child Immunization			12	331.460.000	3	66.560.000	3	99.840.000	3	70.716.120	3	94.288.160	12,00	331.404.280	100,00	99,98	12	331.404.280	-	-					
		02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan terlayani Mobil Ambulance			12	12.930.616.000	3	1.270.360.000	3	5.089.396.000	3	2.690.279.664	3	3.587.039.552	12,00	12.637.075.216	100,00	97,73	12	12.637.075.216	-	-					
		02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Menular Sesuai Standar			12	24.955.553.119	2	2.055.092.000	3	8.380.976.560	3	5.167.892.277	3	6.851.649.708	11	22.455.610.545	91,67	89,98	11	22.455.610.545	-	-					
		02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kesehatan Bagi Seluruh Krama di Kabupaten Badung			12	101.292.746.447	3	228.041.600	3	16.905.486.512	3	42.949.549.378	3	41.123.576.825	12	101.206.654.315	100,00	99,92	12	101.206.654.315	-	-					
		02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyanikes dan Sekolah	Persentase Siswa SMAN/SMKN yang dilakukan Skrinning NAPZA					-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Proporsi Suspek PD3I dan KLB Keracunan dilakukan pengambilan dan pengiriman sampel ke Laboratorium			80	128.800.000					1,3	1.700.000	36,1	46.550.000	37	48.250.000	46,83	37,46	37	48.250.000	-	-					
		02 02 2.02 29	Penyenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan Sehat yang Mengembangkan Tatanan Kabupaten Sehat			12	33.840.732	3	3.328.000	3	13.312.000	3	7.071.612	3	9.428.816	12	33.140.428	100,00	97,93	12	33.140.428	-	-					
		02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas			12	106.022.059	2	6.816.524	3	27.266.096	4	57.824.773	2	783.552	11	92.690.945	91,67	87,43	11	92.690.945	-	-					
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs I	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas			12	1.895.658.822			-			-	7	1.054.087.368	7,00	1.054.087.368	58	55,61	7	1.054.087.368	-	-					
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs II	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas			12	943.129.525			-			-	8	558.220.483	8,00	558.220.483	67	59,19	8	558.220.483	-	-					
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs III	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas			12	1.008.714.081			-			-	8	640.218.845	8,00	640.218.845	67	63,47	8	640.218.845	-	-					
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs IV	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas			12	1.353.676.524			-			-	4	381.222.060	4,00	381.222.060	33	28,16	4	381.222.060	-	-					
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta I	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas			12	1.679.789.650			-			-	5	592.140.382	5,00	592.140.382	42	35,25	5	592.140.382	-	-					
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta II	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas			12	513.812.281			-			-	7	267.523.537	7,00	267.523.537	58	52,07	7	267.523.537	-	-					
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta Selatan	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas			12	1.920.687.562			-			-	5	746.371.971	5,00	746.371.971	42	38,86	5	746.371.971	-	-					
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi I	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas			12	2.440.663.775			-			-	7	1.413.008.126	7,00	1.413.008.126	58	57,89	7	1.413.008.126	-	-					
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi II	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas			12	1.343.177.418			-			-	7	757.468.164	7,00	757.468.164	58	56,39	7	757.468.164	-	-					
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi III	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas			12	1.239.075.617			-			-	6	593.286.717	6,00	593.286.717	50	47,88	6	593.286.717	-	-					
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Petang I	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas			12	992.063.478			-			-	5	312.683.895	5,00	312.683.895	42	31,52	5	312.683.895	-	-					
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Petang II	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas			12	809.560.000			-			-	7	463.285.197	7,00	463.285.197	58	57,23	7	463.285.197	-	-					
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta Utara	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas			12	1.834.344.137			-			-	12	804.028.460	12,00	804.028.460	100	43,83	12	804.028.460	-	-					
		02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah puskesmas yang mengelola BOK yang transparan dan akuntabel							-			-		-	-												
		02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Akreditasi			12	606.827.002	1	12.792.000	1	19.188.000	1	13.618.224	1	18.157.632	4,00	63.755.856	33,33	10,51	4	63.755.856	-	-					
																-													

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021





No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
1	2	3	4	5	6		Rp.		7		Rp.		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		03 04 2.01 05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya Peningkatan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS					100%		39.926.483,00																				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	Predikat kinerja						
5		03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik					0%		0,00																				
		03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik					0%		0,00																				
		03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota					0%		0,00																				
		03 07 2.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di daerah kab/kota					0%		0,00																				
		03 07 2.01 04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di daerah kab/kota					0%		0,00																				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	Predikat kinerja						
6		03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik					100%		33.329.069.510,00	0,01	161.480.000,00	-	0,00	0,37	12.359.289.093	0,58	19.315.187.908	0,96	31.855.957.001,00	95,58	95,58	0,96	31.855.957.001,00						
		03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik					100%		33.329.069.510,00	0,01	161.480.000,00	-	0,00	0,37	12.359.289.093	0,58	19.315.187.908	0,96	31.855.957.001,00	95,58	95,58	0,96	31.855.957.001,00						
		03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terlaksananya Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG					100%		1.448.594.560,00	-	-	-	-	-	0,13	193.851.200	0,13	193.851.200,00	13,38	13,38	0,13	193.851.200,00							
		03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Gedung Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Tersusunanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung					100%		30.877.675.964,00	-	-	-	-	0,38	11.883.373.793	0,61	18.784.297.108	0,99	30.667.670.901,00	99,32	99,32	0,99	30.667.670.901,00						
		03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	terlaksananya survei harga dan penyusunan analisa harga satuan bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang					100%		75.650.390,00	-	-	-	-	-	0,99	74.527.700	0,99	74.527.700,00	98,52	98,52	0,99	74.527.700,00							
		03 08 2.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya					100%		924.415.519,00	0,20	181.480.000	-	-	0,51	475.915.300	0,28	262.511.900	1,00	919.907.200,00	99,51	99,51	1,00	919.907.200,00						
		03 08 2.02 09	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik					100%		2.733.077,00																				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		77,68	77,68	Predikat kinerja						
7		03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik					100%		494.648.204,00	0,20	98.280.000,00	-	0,00	0,51	251.215.956	0,29	141.410.608	0,99	490.906.564	99,24	99,24	0,99	490.906.564,00						
		03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik					100%		494.648.204,00	0,20	98.280.000,00	-	0,00	0,51	251.215.956	0,29	141.410.608	0,99	490.906.564	99,24	99,24	0,99	490.906.564,00						
		03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota					100%		0,00																				
		03 09 2.01 02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan					100%		0,00																				
		03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan					100%		0,00																				
		03 09 2.01 06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan					100%		494.648.204,00	0,20	98.280.000	-	-	0,51	251.215.956	0,29	141.410.608	0,99	490.906.564,00	99,24	99,24	0,99	490.906.564,00						
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		99,24	99,24	Predikat kinerja						
8		03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Bai					99,6%		29.685.898.317,00	0,03	909.614.000,00	0,11	3.168.508.572,00	0,34	9.955.871.634	0,31	9.232.679.888	0,78	23.266.674.093,75	78,69	78,38	0,78	23.266.674.093,75						
		03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Infrastrutur Jalan Kabupaten berkondisi baik					99,6%		29.685.898.317,00	0,03	909.614.000,00	0,11	3.168.508.572,00	0,34	9.955.871.634,00	0,31	9.232.679.887,75	0,78	23.266.674.093,75	78,69	78,38	0,78	23.266.674.093,75						
		03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	tercapainya penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jalan					100%		501.864.114,00	0,17	84.448.000	0,31	153.672.000	0,16	81.631.344	0,24	119.305.792	0,87	439.057.136,00	87,49	87,49	0,87	439.057.136,00						
		03 10 2.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	tercapainya pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan					100%		126.129.263,00	-	-	-	-	-	0,73	91.561.900	0,73	91.561.900,00	72,59	72,59	0,73	91.561.900,00							
		03 10 2.01 04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	tersedianya dokumen survei kondisi jalan/ jembatan					100%		667.891.690,00	-	-	-	-	0,15	100.804.990	0,44	295.340.870	0,59	396.145.860,00	59,31	59,31	0,59	396.145.860,00						
		03 10 2.01 06	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya rekonstruksi jalan					100%		11.778.900.273,00	-	-	-	-	0,58	6.878.651.940	0,11	1.319.485.384	0,70	8.198.137.324,00	69,60	69,60	0,70	8.198.137.324,00						
		03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terwujudnya Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Badung, Optimalnya Fungsi Jalan di Kabupaten Badung, Memper lancar Arus Transportasi Barang dan Jasa dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat					100%		15.252.721.594,00	0,05	825.166.000	0,20	3.014.836.572	0,17	2.660.535.136	0,44	6.656.269.560	0,86	13.156.807.267,75	86,26	86,26	0,86	13.156.807.267,75						
		03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terwujudnya Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Badung, Optimalnya Fungsi Jalan di Kabupaten Badung, Memper lancar Arus Transportasi Barang dan Jasa dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat					100%		1.031.051.560,00	-	-	-	-	0,23	234.248.224	0,50	514.271.382	0,73	748.519.606,00	72,60	72,60	0,73	748.519.606,00						
		03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan					100%		327.339.823,00	-	-	-	-	-	-	0,72	236.445.000	0,72	236.445.000,00	72,23	72,23	0,72	236.445.000,00						
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		74,30	74,30	Predikat kinerja						
9		03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai					100%		957.779.762,00	0,09	85.280.000,00	-	0,00	0,24	232.651.120,00	0,47	448.582.241,00	0,80	766.513.361,00	80,03	80,03	0,80	766.513.361,00						
		03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang Kompeten di Kabupaten Badung					100%		1.935.097,00																				
		03 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Terwujudnya Pelaksanaan Pelatihan Jasa Konstruksi					100%		1.935.097,00																				

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021









LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021



LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021



LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100										
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perkantoran			12 bulan	3	57.233.341	3	569.117.054	3	256.476.835	3	447.335.898	12	1.330.163.128											
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu penerangan yang tersedia			3 line/tahun	4	4.024.482,00	-	-	-	-	-	3	3.990.000	3	3.990.000	100	99,14								
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia			8 jenis	5	5.134.218,00	-	-	-	-	-	6	3.953.000	6	3.953.000	75,00	76,99								
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sarana dekorasi, sarana upacara keagamaan, dan upakara penganyaran yang terlaksana			16 jenis	8	28.901.750,00	8	4.821.000	2	5.059.000	3	4.335.000	3	4.458.750	16	18.673.750	100	64,61							
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			22 jenis	22	24.974.091,00	-	-	22	24.598.594	-	-	-	-	22	24.598.594	100	98,50							
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia			12 bulan	12	49.190.000,00	3	14.227.500	3	9.485.000	3	13.950.000	3	10.462.500	12	48.125.000	100	97,83							
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terwujudnya terbit Adminduk berbasis NIK Nasional melalui database kependudukan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemkab. Badung			97 %	97	1.445.696.657,00	3	38.184.841	37	529.974.460	17	238.191.835	40	424.471.648	97	1.230.822.784	100	85,14							
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan			12 bulan	12	1.103.515.423,00	3	184.091.077	3	296.891.765	3	263.257.172	3	353.099.402	12	1.097.339.416									
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan			42 jenis	42	29.944.528,00	-	-	33	27.573.000	-	-	9	1.208.500	42	28.781.500	100	96,12				Disdukcapil			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar			12 bulan	12	1.000.217.004,00	3	166.321.029	3	248.869.193	3	248.942.506	3	331.603.682	12	995.736.410	100	99,55							
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah benda pos lainnya yang tersedia Jumlah materi yang tersedia Jumlah perangk yang tersedia Jumlah THL yang dibayar			10 buku cek 603 materi 325 perangk 1 orang	10	73.353.891,00	603	17.770.048		20.449.572		14.314.666	10	20.287.220	10	72.821.506	100	99,27							
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang terpelihara			95 %	95	942.692.680,00	28	92.867.600	21	235.269.800	28	166.094.008	18	232.494.276	95	726.725.684									
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara			10 mobil 13 sepeda motor	10	449.504.680,00	3	92.867.600	3	93.562.800	2	102.024.336	2	100.253.748	10	388.708.484	100	86,47							
				Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia			21648 liter	5.970		3.980		5.980		5.718		21.648			100									
				Jumlah/jasa tenaga sopir yang dibayar			3 orang	3		3		3		3		3		3	100									
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara			3 jenis	3	493.188.000,00	-	-	1	141.707.000	1	64.069.672	1	132.240.528	3	338.017.200	100	68,54							
				Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara			2 jenis	2	-	-	-	-	-	-	2		2		100									
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		94,90	89,71						
																			Predikat kinerja		ST	T					SR	SR
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	2	02	Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk Kab. Badung, jumlah KK, jumlah wajib KTP, jumlah WNA, jumlah SKPWNI/mutasi penduduk, jumlah WNA pemegang KITAS, jumlah WNA pemegang KITAB, dan jumlah penduduk non permanen		62 desa/kel	62	1.369.877.570,00	30	272.272.000	15	408.408.000	3	289.657.704	14	389.166.272	62	1.359.503.976									
		2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan pelayanan wajib KTP, Pemutakhiran KK, dan Cetak KIA			62 desa/kel	62	950.605.706,00	30	188.344.000	15	282.516.000	3	200.351.748	14	269.103.664	62	940.315.412									
		01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang di data penduduk non permanen dan rentan			62 desa/kel	62	452.417.391,00	30	90.584.000	15	135.876.000	3	96.377.568	14	129.486.424	62	452.323.992	100	100				Disdukcapil			
		06	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan KTP-el dan KIA			62 desa/kel	62	498.188.315,00	30	97.760.000	15	146.640.000	3	103.974.180	14	139.617.240	62	487.991.420	100	97,95							
		2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Melayani mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah, Datang			62 desa/kel	62	419.271.864,00	30	83.928.000	15	125.892.000	3	89.305.956	14	120.062.608	62	419.188.564									
		02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan KK dan surat pindah			62 desa/kel	62	419.271.864,00	30	83.928.000	15	125.892.000	3	89.305.956	14	120.062.608	62	419.188.564	100	100							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100	89,30					-	-
																			Predikat kinerja		ST	ST					SR	SR
3	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	2	02	Program Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan akta pencatatan sipil		62 desa/kel	62	1.534.810.039,00	30	224.640.000	15	336.960.000	3	239.106.420	14	425.793.055	62	1.226.499.475									
		2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan akta pencatatan sipil			62 desa/kel	62	1.534.810.039,00	30	224.640.000	15	336.960.000	3	239.106.420	14	425.793.055	62	1.226.499.475									
		01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kematian yang diterbitkan Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan Jumlah akta perubahan status anak, pewarganegaraan yang diterbitkan			4500 Kutipan Akta 10500 Kutipan Akta 1500	4500	393.904.039,00	1.124	-	920	-	5.753	-	1.991	105.988.495	9.788	105.988.495	218	26,91				Disdukcapil			
									883		778		6.045		3.689		11.395		109									
									-		18		50		72		140		9,33									



LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021





LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021



LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

[illegible]



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.	K	Rp.	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17																		
			01 Sub.Kegiatan Fasilitas usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan yang mendapat konsultasi			750 UMKM	305.826.000	187	38.896.000	187	94.859.076	188	4.864.590	188	55.172.888	750	193.792.554	100,00	63,37	750	193.792.554					Diskop UKMP							
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	63,37					SR	SR								
																	Predikat kinerja		ST	R														
																	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		11.677.696.844									10.639.308.054						
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)										98,35	76,58					-	-
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)										ST	T					SR	SR
		18	Penanaman Modal																															
1		2 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	21.351.718.528	25	204.513.377	25	378.459.867	25	12.247.481.553	25	6.244.948.564	100	19.075.403.361							19.075.403.361									
		2 1 2.01	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	123	13.392.809		-	41	3.735.000	41	2.516.250		5.573.650	82	11.824.900	67	88,29	82	11.824.900														
		2 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	90	6.456.446		-	-	-	45	2.516.250	45	3.215.650	90	5.731.900	100,00	88,78	90	5.731.900	-	-												
		2 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJP, IKU, PK dan RKT yang Tersusun		85	6.936.363		-	43	3.735.000	-	-	42	2.358.000	85	6.093.000	100,00	87,84	85	6.093.000	-	-											
		2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah		12	18.833.680.936		-	-	-	125	11.643.165.100	-	5.611.395.271	125	17.254.560.371	1.042	91,62	125	17.254.560.371	-	-											
		2 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN		125	18.833.680.936		-	-	-	125	11.643.165.100	-	5.611.395.271	125	17.254.560.371	100,00	91,62	125	17.254.560.371	-	-											
		2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah		12	454.800.705	3	51.820.620	3	121.328.120	3	57.769.076		126.915.378	9	357.833.194	75	78,68	9	357.833.194													
		2 1 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		12	11.766.260		-	-	-		12	8.008.000	12	8.008.000	100,00	68,06	12	8.008.000	-	-												
		2 1 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya administrasi kantor		12	23.492.353		-	4	14.428.920	-	-	-	5.096.960	4	19.525.880	33,33	83,12	4	19.525.880	-	-											
		2 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12	234.692.563	3	37.885.620	3	56.302.900	3	36.866.576	3	45.858.168	12	176.913.264	100,00	75,38	12	176.913.264	-	-											
		2 1 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12	83.108.529		-	6	14.121.800			6	40.082.250	12	54.204.050	100,00	65,22	12	54.204.050													
		2 1 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia		888	83.610.000	222	13.935.000	222	20.902.500	222	20.902.500	222	27.870.000	888	83.610.000	100,00	100,00	888	83.610.000	-	-											
		2 1 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1	18.131.000		-	1	15.572.000	-	-	-	-	1	15.572.000	100,00	85,89	1	15.572.000	-	-											
			SKPD				paket																											
		2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12	1.081.276.400	3	116.716.157	3	81.852.312	3	474.045.715	-	343.956.789	9	1.016.570.973	75	94,02	9	1.016.570.973													
		2 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi dan buku cek yang tersedia		210	2.100.000		-		-			210	2.100.000	210	2.100.000	100,00	100,00	210	2.100.000													
		2 1 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, air, listrik yang dipakai		12	1.079.176.400	3	116.716.157	3	81.852.312	3	474.045.715	3	341.856.789	12	1.014.470.973	100,00	94,00	12	1.014.470.973	-	-											
		2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		12	968.567.678	3	35.976.600	3	171.544.435	3	69.985.412	3	157.107.476	12	434.613.923	100	44,87	12	434.613.923													
		2 1 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1	90.208.150	1	10.542.000	-	28.102.950	-	10.971.612	-	23.473.816	1	73.090.378	100,00	81,02	1	73.090.378	-	-											
							unit																											
		2 1 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda dua		28	766.279.528	7	25.434.600	7	143.441.485	7	47.111.800	7	122.492.510	28	338.480.395	100,00	44,17	28	338.480.395	-	-											
				Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda empat		17		5			5		7																					
		2 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara		12	112.080.000		-	-	6	11.902.000	6	11.141.150	12	23.043.150	100,00	20,56	12	23.043.150														
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		95,24	77,55					-	-								
																	Predikat kinerja		ST	T					SR	SR								
2		2 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengaduan yang tertangani			100%	1.315.995.239	25	240.552.000	25	360.828.000	25	286.124.644		396.945.877	75			75	1.284.450.521	-	-											
		2 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100%	1.315.995.239	25	240.552.000	25	360.828.000	25	286.124.644		396.945.877	75			75	1.284.450.521	-	-											
		2 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Terbit Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6000 Izin Persentase terbayarnya upah tenaga kerja non pegawai		6.000	1.305.810.433	2.113	240.552.000	1.768	360.828.000	893	286.124.644	744	387.479.277	5.518	1.274.983.921	91,97	97,64	5.518	1.274.983.921	-	-											

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17												
	2	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah forum matchmaking antara UMKM dengan PMA/PMDN	1	10.184.806	-	-	-	-	-	1	9.466.600	1	9.466.600	100,00	92,95	1	9.466.600	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	95,98	95,29										
Predikat kinerja																	ST	ST			SR	SR						
3	2	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Kebijakan yang mendukung investas	6 kecamatan	323.046.712	-	2	44.050.300	2	109.197.200	2	128.198.800	6	281.446.300				281.446.300							
	2	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	323.046.712	-	2	44.050.300	2	109.197.200		128.198.800	4	281.446.300	400	87,12	4	281.446.300	-	-					
	2	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dipantau pelaksanaan penanaman modal	50	46.500.000	-	20	4.650.000	20	16.740.000	10	19.530.000	50	40.920.000	100,00	88,00	50	40.920.000	-	-					
	2	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina dan difasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal	kali	9	202.146.712	-	3	25.450.300	3	71.997.200	3	79.838.800	9	177.286.300	100,00	87,70	9	177.286.300	-	-				
	2	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan penanaman modal	kali	80	74.400.000	-	27	13.950.000	27	20.460.000	26	28.830.000	80	63.240.000	100,00	85,00	80	63.240.000	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100,00	86,90			-	-						
Predikat kinerja																	ST	T			SR	SR						
4	2	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan pelayanan publik	6	645.185.105	2	26.624.000	2	177.936.000	2	189.824.948		245.045.263	6	639.430.211			6	639.430.211	-	-				
	2	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan publik	kecamatan	100	645.185.105	25	26.624.000	25	177.936.000	25	189.824.948		245.045.263	75	639.430.211	75	99,11	75	639.430.211	-	-			
	2	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Terwujudnya Sistem Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang didukung infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi dan sarana serta prasarana pendukung yang bekerja optimal	%	100	645.185.105	25	26.624.000	25	177.936.000	25	189.824.948	25	245.045.263	100	639.430.211	100,00	99,11	100	639.430.211	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100,00	99,11			-	-						
Predikat kinerja																	ST	ST			SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								23.635.945.584								21.280.730.393												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																	97,81	89,71			-	-						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																	ST	T			SR	SR						
1	Meningkatkan Kualitas SDM	2	02	.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PRESTASI BIDANG KEPELOPORAN PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100	4.926.143.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora			
	2	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		100																					
	2	02	2.01	01	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis		8	4.926.143.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Orang																												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	-	-			-	-						
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR						
2	Meningkatkan Kualitas SDM	2	03	.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE PRESTASI CABANG OLAHRAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100	4.822.621.540	25	263.702.533	25	696.935.816	25	626.147.139	25	1.045.425.904	100	263.702.533	100	5,47	100	263.702.533	-	-	Disdikpora			
	2	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Cabang Olah Raga yang berprestasi	100																					
	2	03	2.05	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	100	2.411.310.770	-	-	-	-	-	-	100	565.455.500	100	565.455.500	100	23,45	100	565.455.500						
	2	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Dipelihara Baik	100																					
	2	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Persentase Pemenuhan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	100	2.411.310.770	25	263.702.533	25	696.935.816	25	626.147.139	25	479.970.404	100	2.066.755.892	100	85,71	100	2.066.755.892						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	100	54,58			-	-						
Predikat Kinerja																	ST	R			SR	SR						
3	Meningkatkan Kualitas SDM	2	04	.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		100	538.712.598	25	75.665.708	25	127.598.190	25	120.453.389	25	120.453.389	100	293.027.891	100	54,39	100	293.027.891	-	-	Disdikpora			
	2	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		100																					
	2	04	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		100	538.712.598	25	75.665.708	25	127.598.190	25	120.453.389	25	96.908.794	100	420.626.081	100	78,08	100	420.626.081						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												
Predikat Kinerja																												





No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.										
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17												
				01	Sub Kegiatan Peindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya			Paket	1	35.256.239.024	0,25	757.960.000	0,25	1.894.940.000	0,25	3.722.711.120	0,25	16.441.473.610	1	22.817.084.730	100,00	64,72				Disbud												
				03	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pemeliharaan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan			Paket	1	36.538.067.369	0,25	4.333.465.300	0,25	15.201.007.250	0,25	7.376.830.956	0,25	9.528.024.608	1	36.439.328.114	100,00	99,73																
		2	22	02	2.01	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang terbina		Paket	1	128.734.000	0,25	25.584.000	0,25	38.376.000	0,25	27.236.448	0,25	36.315.264	1	127.511.712																		
									Paket																														
				02	Sub Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah pembinaan sumber daya manusia lembaga dan pranata adat			Paket	1	128.734.000	0,25	25.584.000	0,25	38.376.000	0,25	27.236.448	0,25	36.315.264	1	127.511.712	100,00	99,05																
									Paket																														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	87,85			-	-												
																				Predikat kinerja		ST	T																
3	SASARAN MENINGKATKAN KREATIVITAS SERTA PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA	2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pembinaan Kesenian Tradisional			1	135.316.696	0,25	25.064.000	0,25	37.596.000	0,25	19.253.382	0,25	44.519.080	1	126.432.462	100,00	93,43																	
									Paket																														
		2	22	03	2.01	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya kesenian tradisional		Paket	1	135.316.696	0,25	25.064.000	0,25	37.596.000	0,25	19.253.382	0,25	44.519.080	1	126.432.462						Disbud												
									Paket																														
				01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dokumen dan data kesenian inovatif kelompok sekas kesenian yang tersedia			Paket	1	135.316.696	0,25	25.064.000	0,25	37.596.000	0,25	19.253.382	0,25	44.519.080	1	126.432.462	100,00	93,43																
									Paket																														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	93,43			-	-												
																				Predikat kinerja		ST	ST			SR	SR												
4	SASARAN MENINGKATKAN KREATIVITAS SERTA PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA	2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya			1	201.935.704	0,25	39.936.000	0,25	59.904.000	0,25	42.429.672	0,25	57.982.096	1	200.251.768	100,00	99,17																	
									Paket																														
		2	22	05	2.01	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya		Paket	1	201.935.704	0,25	39.936.000	0,25	59.904.000	0,25	42.429.672	0,25	57.982.096	1	200.251.768						Disbud												
									Paket																														
				01	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Ciduga Cagar Budaya	Jumlah karya budaya yang dikaji dan WBTB yang teridentifikasi serta mendapat sertifikat			Paket	1	201.935.704	0,25	39.936.000	0,25	59.904.000	0,25	42.429.672	0,25	57.982.096	1	200.251.768	100,00	99,17																
									Paket																														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	99,17			-	-												
																				Predikat kinerja		ST	ST			SR	SR												
4	SASARAN MENINGKATKAN KREATIVITAS SERTA PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA	2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan Permuseuman			1	856.567.287	0,25	51.168.000	0,25	82.765.155	0,25	137.792.396	0,25	559.795.478	1	831.521.029	100,00	97,08																	
									Paket																														
		2	22	06	2.01	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten Badung	Persentase pengelolaan museum Kabupaten Badung		Paket	1	856.567.287	0,25	51.168.000	0,25	82.765.155	0,25	137.792.396	0,25	559.795.478	1	831.521.029						Disbud												
									Paket																														
				01	Sub Kegiatan Peindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan koleksi secara Terpadu	Mengembangkan dan menyebarkan informasi tentang Museum			Paket	1	438.351.295	0,25	51.168.000	0,25	78.177.682	0,25	69.072.896	0,25	228.237.378	1	426.655.956	100,00	97,33																
									Paket																														
				03	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Museum			Paket	1	408.626.111				1	63.888.000		331.558.100	1	395.446.100	100,00	96,77																	
									Paket																														
				04	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Museum			Paket	2	9.589.881		0,50	4.587.473	0,50	4.831.500		-	1	9.418.973	50,00	98,22																	
									Paket																														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		83,33	97,44			-	-												
																				Predikat kinerja		T	ST			SR	SR												
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		90.456.707.877											75.751.071.615																

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17							
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		26	350.579.000	5	34.095.000	9	32.284.000	15	57.513.200	26	86.919.100	26	210.811.300	100,00	60,13									
							Unit Kendaraan																						
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		2	20.720.000	-	-	-	-	-	-	2	15.873.000	2	15.873.000	100,00	76,61									
							Paket																						
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		94,36	76,92			-	-					
																	Predikat kinerja		ST	T			SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									13.547.293.056								12.010.487.962												
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		90,05	88,45			-	-					
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		T	T			SR	SR					
		24	Kearsipan																										
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Kearsipannya Baik	24%	582.028.000	6%	116.688.000	6%	175.032.000	6%	124.139.016	6%	165.518.688	24,00	581.377.704											
			02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	1	326.410.000	0,20	65.520.000	0,30	98.280.000	0,21	69.666.128	0,28	92.888.160	1,00	326.354.280											
				01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang diolah dan ditata	Unit Kerja	1	193.826.000	0,20	38.896.000	0,30	58.344.000	0,21	41.379.672	0,28	55.172.896	1	193.792.568	99,52	99,98								
				02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara, dinilai dan dimusnahkan	Unit kerja	325	132.584.000	-	26.624.000	25	39.936.000	80	28.286.448	220	37.715.264	325	132.561.712	100,00	99,98								
							Box																						
			02	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dikelola	1	191.301.000	0,20	38.376.000	0,30	57.564.000	0,21	40.854.672	0,28	54.472.896	1,00	191.267.568											
							Perangkat daerah																						
			02		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis perangkat daerah yang diakuisisi	1	191.301.000	0,20	38.376.000	0,30	57.564.000	0,21	40.854.672	0,28	54.472.896	1	191.267.568	99,51	99,98									
							Perangkat daerah																						
			02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip statis yang Dilmput pada SKN dan JIKN	1000	64.317.000	450	12.792.000	450	19.188.000	207	13.618.224	373	18.157.632	1.480	63.755.856											
				02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit kerja yang dina, dimonitoring dan ditingkatkan pengetahuannya	Berkas	76	64.317.000	19	12.792.000	18	19.188.000	20	13.618.224	19	18.157.632	76	63.755.856	100,00	99,13								
							Unit Klerja																						
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		99,76	99,77			-	-					
																	Predikat kinerja		ST	ST			SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									582.028.000								581.377.704												
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		99,76	99,77			-	-					
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		ST	ST			SR	SR					
		3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
		25			Kelautan dan Perikanan																								
1	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		01		Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100	9.124.150.226,00	25	1.450.172.995	25	2.363.573.658	25	1.868.884.248		2.135.119.452		7.817.750.353											
			2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen kegiatan kegiatan	12	15.546.777,00	-	-	1	630.000	-	-	1	4.395.143		5.025.143											
						Jenis Dokumen																							
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	12	8.497.896,00	-	-	15	630.000	-	-	1	4.395.143	12	5.025.143	100	99,13	12	5.025.143							
						Jenis Dokumen																							
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Wntisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						orang																							
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen sapik yang tersusun	9	7.048.879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						dokumen																							
			2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai negeri sipil yang terbayarkan gaji dan tunjangan	55	7.942.853.568,00	49	1.225.569.778	50	2.163.270.368	49	1.681.440.893	54	1.949.599.524		7.019.880.563											
						orang																							
			01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dana untuk gaji dan tunjangan ASN	55	7.942.853.568,00	49	1.225.569.778	49	2.163.270.368	49	1.681.440.893	54	1.949.599.524	49	7.019.880.563	89,09	88,38	49	7.019.880.563							
						orang																							
			2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12	365.843.283,00	3	99.943.990	3	60.447.750	3	65.167.500	3	52.553.500		278.112.740											
						bulan																							
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kantor yang mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan	5	7.114.303,00	5	3.228.000	-	-	-	-	-	-	5	3.228.000	100	45,37	5	3.228.000							
						bangunan/kantor																							

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17							
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis dan alat kantor lainnya yang tersedia dalam 12 bulan		12	58.278.283,00	29	37.031.390	-	-	-	-	-	-	12	37.031.390	100	63,54	12	37.031.390							
					Jumlah pengadaan alat kantor																								
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun		4	2.814.392,00	4	1.902.400	-	-	-	-	-	-	4	1.902.400	100	67,60	4	1.902.400							
							bangunan/kantor																						
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bangunan yang mendapatkan upacara keagamaan dalam 12 bulan		12	241.587.500,00	6	37.556.500	6	51.081.000	6	56.220.000	3	43.606.000	12	188.463.500	100	78,01	12	188.463.500							
					Jumlah pemasangan BBI		-																						
					Jumlah spanduk dan bendera merah putih yang tersedia dalam 1 tahun		paket																						
					Jumlah tersedianya makanan dan minuman yang disuguhkan untuk tamu dalam 12 bulan		-																						
							orang																						
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan		12	16.195.805,00	1	10.020.450	-	-	-	-	-	-	12	10.020.450	100	61,87	12	10.020.450							
							Bulan		paket									paket											
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar/majalah dinas yang dimanfaatkan		388	39.853.000,00	99	10.205.250	97	9.366.750	96	8.947.500	96	8.947.500	388	37.467.000	100	94,01	388	37.467.000							
							exp/bulan		exp/bulan								exp/bulan	exp/bulan											
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
							LS																						
			2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah		12	282.392.098,00	3	56.342.375	3	78.561.236	3	57.918.743	3	75.857.873		268.680.227				268.680.227							
							bulan		bulan																				
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan materiail dalam 1 tahun		178	1.780.000,00	-	-	-	-	50	500.000	-	-	50	500.000	28,09	28,09	50	500.000							
					Jumlah pengadaan buku cek dalam 1 tahun		buah																						
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	35.644.098,00	3	7.254.375	3	4.929.236	3	5.045.847	3	6.027.345	12	23.256.803	100	65,25	12	23.256.803							
							bulan																						
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam 12 bulan		8	244.968.000,00	8	49.088.000	8	73.632.000	8	52.372.896	8	69.830.528	8	244.923.424	100	99,98	8	244.923.424							
							orang																						
			2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan aset milik daerah		12	517.514.500,00	3	68.316.852	3	60.664.304	3	64.357.112	1	52.713.412		246.051.680				246.051.680							
							bulan																						
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas kepala OPD dalam 1 tahun		1	96.917.370,00	1	14.402.000	1	26.545.704	1	13.283.612	1	13.401.612	1	67.632.928	100	69,78	1	67.632.928							
					Jumlah tenaga sopir kepala perangkat daerah yang diberikan gaji dalam 12 bulan		1																						
							orang																						
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional dalam 1 tahun		25	377.314.330,00	25	51.269.852	25	34.118.600	25	51.073.500	25	39.311.800	25	175.773.752	100	46,59	25	175.773.752							
							kendaraan																						
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dalam 1 tahun		50	38.808.000,00	4	2.645.000	-	-	-	-	-	-	4	2.645.000	8,00	6,82	4	2.645.000							
					Jumlah penyucian kain korden dalam 1 tahun		1																						
							kali																						
			09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kantor/bangunan yang dapat beroperasi dengan baik		4	4.474.800																					
							kantor/bangunan																						
																		Rata-rata capaian kinerja (%)				87,51	62,46			-	-		
																		Predikat kinerja				T	R			SR	SR		
2	Meningkatnya Kontribusi sektor terhadap PDRB	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap			7288	-	500,04	-	#####	-	#####	-	1.121	-													
							ton		ton																				
			2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perikanan tangkap		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
							kabupaten		kabupaten																				
			03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok penerima bantuan		0	-																					
							kelompok																						
																		Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-			-	-		









LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021



LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021









LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17	
		02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses					100	5.951.284.278	33	37.856.000.000	33	293.415.000	10	528.989.552	4	998.592.448	80	1.858.853.000	80,00	31,23	80,00	1.858.853.000.00				
									%		%		%		%		%											
		02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					100	1.007.160.000	-	-	40	-	40	87.248.900	20	297.872.900	100	385.121.800,00				100,00	385.121.800,00			
									%		%		%		%		%											
		02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD					100	1.007.160.000	-	-	-	-	5	87.248.900	95	297.872.900	100	385.121.800	100	38,24	100,00	385.121.800,00				
									%		%		%		%		%											
		02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					100	8.087.573.000	20	-	30	1.070.896.225	30	1.801.579.903	20	4.270.355.062	100	7.142.831.190				100,00	7.142.831.190			
									%		%		%		%		%											
		02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					100	8.087.573.000	-	-	18,41	1.070.896.225	21	1.801.579.903	60,59	4.270.355.062	100	7.142.831.190	100	88,32	100,00	7.142.831.190,00				
									%		%		%		%		%											
		02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Undangan DPRD					100		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-			
									%																			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		94,75	122,02				-	-	
																			Predikat kinerja		ST	ST				SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											87.116.791.188									140.230.531.140								
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		92,69	122,66				-	-	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		ST	ST				SR	SR	
		5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		01		Perencanaan																								
1		01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100	1.645.770.318	25	163.768.815	25	156.664.763	25	132.589.262	-	218.278.450	75	671.281.290				671.281.290			Bappeda	
				KEGIATAN :																								
		01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100	229.086.314	25	21.008.000	25	31.512.000	25	22.264.836	-	52.411.332	75	127.196.168				127.196.168				
				SUB KEGIATAN :																								
		01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah				3	19.299.342	-	-	-	-	-	-	2	10.948.900	2	10.948.900	67	57	2	10.948.900				
					Jenis Dok																							
		06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel				100	100.995.828	25	7.176.000	25	10.764.000	25	7.596.612	-	10.128.816	75	35.665.428	75	35,31	75	35.665.428				
					Jenis																							
		07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				4	108.791.144	-	13.832.000	2	20.748.000	1	14.668.224	-	31.333.616	3	80.581.840	75	74,07	3	80.581.840				
					Jenis Dok																							
				KEGIATAN :																								
		06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran				100	536.882.212	25	42.189.600	25	40.949.200	25	33.007.000	-	76.653.954	75	192.799.754				192.799.754				
				SUB KEGIATAN :																								
		01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8	15.661.526	-	-	-	-	-	-	2	2.732.490	2	2.732.490	25	17,45	2	2.732.490				
					Jenis																							
		02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				28	57.941.049	-	453.200	-	-	-	-	28	29.200.464	28	29.653.664	100	51,18	28	29.653.664				
					Jenis																							
		03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				11	14.177.784	11	300.000	-	-	-	-	-	-	11	300.000	100	2,12	11	300.000				
					Jenis																							
		04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Tersedianya Aci - Aci/Sesajen, Transportasi dan Akomodasi - Tersedianya Alat - Alat Dekorasi - Tersedianya Bahan Upakara Keagamaan - Tersedianya Tanaman Hias untuk Lingkungan Bappeda				2	105.928.000	1	6.697.000	1	5.198.000	-	7.397.000	-	11.382.000	2	30.674.000	100	28,96	2	30.674.000				
					Jenis																							
					Jenis																							
					Jenis																							
					Jenis																							
		05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan				35	118.700.853	35	15.531.900	35	6.600.400	-	-	-	14.281.500	35	36.413.800	100	30,68	35	36.413.800				
					Jenis																							
		06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan				11	77.265.000	-	19.207.500	2	12.805.000	2	25.610.000	-	19.057.500	4	76.680.000	36,36	99,24	4	76.680.000				
					Jenis																							
		09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				1	147.208.000	-	-	1	16.345.800	-	-	-	-	1	16.345.800	100	11,10	1	16.345.800				
					LS																							
				KEGIATAN :																								
		08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran				100	298.131.792	25	18.544.515	25	805.544	25	1.185.202	-	1.639.882	75	22.175.143				22.175.143				
					Jenis																							

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021





No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17	
		2 0 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							562.547.229.102		15.801.500		277.356.458.208		64.111.755.965		108.494.949.244		-	449.978.964.917	-	80	-	449.978.964.917			
			01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah					100%	2.056.979.543	25	15.801.500	25	130.473.775	25	27.060.896	25	397.968.162	100	571.304.333				100	571.304.333			
			01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022					2	124.069.351	-	-		-			2	51.130.981	2	51.130.981	100,00	41,20	2	51.130.981				
			02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022					2	117.003.349	-	-		-			2	42.553.940	2	42.553.940	100,00	36,37	2	42.553.940				
			07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	Jumlah Rencana PERDA dan PERDA tentang APBD dan Rencana Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD					1170	281.464.003	-	-	69.212.000				1.170	79.828.650	1.170	149.040.650	100,00	52,95	1.170	149.040.650				
			08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rencana PERDA dan PERDA tentang Perubahan APBD dan rencana Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD					420	257.792.845	-	-	-	-			420	127.695.315	420	127.695.315	100,00	49,53	420	127.695.315				
			09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Peraturan - peraturan terkait dengan Keuangan Daerah					38	45.385.353	-	-	10.051.550	-			38	4.875.000	38	14.926.550	100,00	32,89	38	14.926.550				
			11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah					38	1.231.234.642	9	15.801.500	9	51.210.225	9	27.060.896	38	91.884.276	38	185.956.897	100,00	15,10	38	185.956.897				
			02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah					100%	206.710.010.523	25	-	25	56.378.795.545	25	32.596.564.606	25	79.983.610.630	100	168.958.970.781				100	168.958.970.781			
			01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah					38	560.697.418	3	-	9	44.926.100	9	193.441.820	17	104.718.800	38	343.086.720	100,00	61,19	38	343.086.720				
			05 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah					12	206.149.313.105	3	-	3	56.333.869.445	3	32.403.122.786	3	79.878.891.830	12	168.615.884.061	100,00	81,79	12	168.615.884.061				
			03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah					100%	727.159.178	-	-	25	14.467.800	25	142.478.025	50	156.696.775	100	313.642.600				100	313.642.600			
			01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.	Buku Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan akurat					127	41.596.989	-	-		-			127	14.361.950	127	14.361.950	100,00	34,53	127	14.361.950				
			02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban.	Laporan Keuangan Triwulanan dan semesteran					240	101.901.372	-	-		-	4.973.625	240	49.190.925	240	54.164.550	100,00	53,15	240	54.164.550					
			04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel					10	32.671.673	-	-	10	14.467.800	-	-		10	14.467.800	100,00	-	10	14.467.800					
			05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.	Buku Rancangan Peraturan Daerah,Rancangan Pertub,PERDA dan PERBUP tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD					1760	508.864.914	-	-		1.000	137.504.400	760	90.560.400	1.760	228.064.800	100,00	-	1.760	228.064.800					
			06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Laporan Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Daerah					1	18.363.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	PERDA Pokok pengelolaan Keuangan Daerah an PERBUP Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah					110	23.761.083	-	-		-			2.583.500	2.583.500	-	10,87	-	2.583.500						
			04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah					100%	353.053.079.858	25	-	25	220.832.721.088	25	31.345.652.438	25	27.956.673.677	100	280.135.047.203				100	280.135.047.203			
			08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan masing-masing Kabupaten se- Provinsi Bali					60	58.486.546.000																		
			09 Pengelolaan Data Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana untuk kebutuhan darurat dan mendesak.					12	294.566.533.858	3		3	220.832.721.088	3	31.345.652.438	3	27.956.673.677	12	280.135.047.203	100,00	95,10	12	280.135.047.203				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	47,06					-	-	
		3 0 02	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah						3.753.201.119		168.279.400		2.027.939.197		28.616.295		729.029.891		2.953.864.783					2.684.196.163			
			01 PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah					100%	3.753.201.119	25	168.279.400	25	2.027.939.197	25	28.616.295	25	729.029.891	100	2.953.864.783	-			2.684.196.163				
			01 Penyusun Standar Harga	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang Standarisasi Harga Barang					125	291.834.523	-		750.000	-			125	210.293.875		211.043.875	-	-	-	-				
			02 Penyusun Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Keputusan Badung tentang standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					38	21.472.207	-						38	17.775.945		17.775.945	-	-	-	-				
			03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang rencana kebutuhan Barang Milik Daerah					38	22.537.773	-			1.752.810	38	16.500.000	38	18.252.810	100,00	80,99	38	18.252.810						
			04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang rencana pemeliharaan /perawatan Barang Milik Daerah					38	27.031.762	-						38	16.732.000	38	16.732.000	100,00	61,90	38	16.732.000				
			05 Penatusahaan Barang milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah					38	80.061.619	-		9	6.454.325	9			71.241.720	18	77.696.045	47,37	97,05	18	77.696.045				

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab		
											I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17		
		5 05 01	2.02 Administrasi Keuangan																										
			Perangkat Daerah																										
		5 05 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ketersediaan gaji dan tunjangan					12 bulan	6.660.330.745	3	972.810.866	3	1.732.653.317	3	1.133.811.669	3	1.761.852.663	12	5.601.128.515	12	84,10	12	5.601.128.515					
		5 05 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah					5 dokumen	9.371.304	-	-	2.395.500	-	5	2.999.500	5	5.395.000	5	5.395.000	5	57,57	5	5.395.000					
		5 05 01	2.06 Administrasi Umum																										
			Perangkat Daerah																										
		5 05 01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor					1 paket = 100%	3.499.914	-	-	-	-	-	-	1	3479800	1	3.479.800	1	99,54	1	3.479.800					
		5 05 01 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor					1 paket = 100%	4.069.191	9,93	600.000	-	-	-	-	1.500.000	9,93	2.100.000	9,93	51,61	9,93	2.100.000						
		5 05 01 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Upakara Keagamaan, Dekorasi Kantor, Aci-Aci/Sesajen dan Akomodasi					3 paket = 100%	48.325.640	4,82	6.625.000	11,69	5.650.000	3,24	4.450.000	1,25	7.587.500	21,00	24.312.500	21,00	50,31	21,00	24.312.500					
		5 05 01 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan					1 paket = 100%	17.442.050	-	-	3,47	605.400	-	-	9.024.100	3,47	9.629.500	3,47	55,21	3,47	9.629.500						
		5 05 01 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah					1 paket = 100%	60.036.000	25,00	15.009.000	16,67	10.006.000	25,00	15.009.000	20.012.000	66,67	60.036.000	66,67	100,00	66,67	60.036.000						
		5 05 01 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					1 paket = 100%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5 05 01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang																										
			Usuran Pemerintahan Daerah																										
		5 05 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor dan benda post lainnya					12 bulan	24.841.642	-	-	6	4.981.100	-	-	6	9.922.500	12	14.903.600	12	59,99	12	14.903.600					
		5 05 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line telepon yang terbayar					5 buah = 100%	7.770.000	5,52	662.748	16,15	1.254.711	12,28	1.472.935	1.318.374	33,94	4.708.768	33,94	60,60	33,94	4.708.768						
		5 05 01 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum perkantoran berupamaterai atau benda pos lainnya					1 paket = 100%	1.000.000	-	-	-	-	100	1.000.000	-	-	100	1.000.000	100	100,00	100	1.000.000					
		5 05 01	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
		5 05 01 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara					21 unit = 100%	507.023.100	10,04	61.350.000	21,12	107.067.000	21,25	129.847.448	21,52	103.745.060	73,93	402.009.508	73,93	79,29	73,93	402.009.508					
		5 05 01 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan yang terbayar					21 unit	14.512.000	4	3.123.100	8	6.203.300	-	-	9	624.000	21,00	9.950.400	21,00	68,57	21,00	9.950.400					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17									
		5 05 01 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan Kantor yang terpelihara			1 paket = 100%	6.850.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	29,20	1	2.000.000							
		5 05 01 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan Kantor yang terpelihara			1 paket = 100%	9.250.000	-	-	46,49	4.300.000	-	-	53,51	4.950.000	100	9.250.000	100	100,00	100	9.250.000							
		5 05 01 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara			1 paket = 100%	9.389.664	-	-	-	-	-	-		4921000	50	4.921.000	50	52,41	50	4.921.000							
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		33,94	62,79	6.168.149.591		-	-					
																	Predikat Kinerja		SR	R	1.244.304.328		SR	SR					
2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif	5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					1.390.472.651		249.912.000																			
		5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																										
		5 05 02 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Penelitian dan Akademik Ranperda Inovasi Daerah/Kabupaten Badung			1 dokumen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Balitbang			
		5 05 02 03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelayakan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung			1 dokumen	44.186.709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		5 05 02 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Tersusunnya Buku Kajian Tim Kelitbangan			4 buku	189.201.188	-	35.880.000	-	53.820.000	-	37.983.060	4	50.644.080	4	178.327.140	100	94,25	4	178.327.140							
		5 05 02 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Tersusunnya Buku Pokok-pokok Pikiran dan Arah Kebijakan serta Buku/Laporan Hasil Kerja Analisis Kebijakan Kabupaten Badung			54 buku	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		5 05 02 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Tersusunnya Buku Forum Kelitbangan dan Buku Laporan Hasil Lokakarya			22 buku	346.503.262	-	56.368.000	-	84.552.000	-	59.722.896		79.630.528	-	280.273.424	-	80,89	-	280.273.424							
		5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																										
		5 05 02 02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gender	Tersusunnya dokumen Indeks Pembangunan Gender			1 dokumen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																										
		5 05 02 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tersusunnya laporan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park			1 dokumen	4.641.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi																										
		5 05 02 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Kabupaten Badung			1 paket = 100%	146.085.910	15,96	28.704.000	29,47	43.056.000	20,11	30.386.448		40.515.264	65,54	142.661.712	65,54	97,66	65,54	142.661.712							

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021



LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab							
					K	Rp.	K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.					
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17													
		7 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum			100%	241.015.548							227.335.000																		
		7 04 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum			1	241.015.548					1	-	227.335.000	1																	
							Jenis																										
			01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Keterlibatan Umum		3	241.015.548					-	3	227.335.000	3	227.335.000	100	94,32										kecamatan kuta selatan				
							Kelurahan																										
												Rata-rata capaian kinerja (%)				100	94,32																
												Predikat kinerja				ST	ST																
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	7 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100	3.568.950			-		-					2.806.000											SR	SR			
		7 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Tugas Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Tugas Kepala Daerah			%	1	3.568.950			-		-				2.806.000												kecamatan kuta selatan			
							Jenis																										
			03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional		7	3.568.950	-	-	-	-		7	2.806.000	7	2.806.000	100	78,62														
							hari besar																										
												Rata-rata capaian kinerja (%)				100	78,62																
												Predikat kinerja				ST	T																
5	Meningkatnya Eksistensi adat dan budaya di Kecamatan Kuta Selatan	7 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	7.541.292			-		-		2.284.000			2.284.000															
		7 06 2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			%	3	7.541.292	-	-	-	-		2.284.000	-		2.284.000															
							Jenis											2.284.000															
			02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		3	1.668.600	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-									kecamatan kuta selatan			
							desa																										
			06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan/Monitoring Pemilihan Perbekel		2	2.317.500	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-												
							desa																										
			09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah APBDes yang Diverifikasi		3	3.555.192	-	-	-	-	3	2.284.000	-	3	2.284.000	100	64,24														
							APBDes																										
												Rata-rata capaian kinerja (%)				100	64,24																
												Predikat kinerja				ST	R																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									14.952.070.759								13.944.705.827,00																
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)									100	93,26														
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)									ST	ST														
1	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						154	19.972.721.671	9	6.112.094.746	22	4.182.588.324	21	5.135.557.105	56	5.269.635.728	108	20.699.875.903	70,13	103,64											
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4.566.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan		3	2.684.697			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
							Dokumen																										
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Bulan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah		20	1.881.329			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
							Buku																										
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.436.771.346		2.616.922.878																					
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar		12	16.436.771.346	3	2.616.922.878	3	3.559.384.247	3	4.221.256.054	3	4.544.284.422	12	14.941.847.601	100	90,91													
							Bulan																										
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						684.466.696		-																					
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang tersedia Dalam 1 tahun di Kantor Camat mengwi dan Kelurahan		1	22.644.138			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
							Paket																										
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1	529.020.738			-	1	79.472.000	-	162.198.500	-	62.543.000	1	304.213.500	100	57,51												
							Paket																										
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor Camat mengwi		1	43.701.820			-		-	1	1.465.709		3.191.608	1	4.657.317	100	10,66												
							Paket																										
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan/Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kantor Camat mengwi		1	89.100.000			-	1	14.985.000	-	-	-	-	1	14.985.000	100	16,82									Kec. Mengwi			
							Paket																										
			09	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun		1	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
							Paket																										





No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17								
			04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					466.018.339		-	-	-					-	-									
			01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan UMK		18		1.541.347	-	-	18		1.541.347	-	-	-	18		1.541.347	100	100						
							Desa											-	-									
			02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah pelayanan Administrasi Kependudukan		18		464.476.992	18	93.008.656	18		94.257.607	18	146.158.489	18		131.051.933	18		464.476.885	100	100				
							Desa																					
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100	100								
																	Predikat kinerja		ST	ST				SR	SR			
3	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	1	0	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1		3.047.814	1	3.025.500	0	0					1		3.025.500	100	99,27						
			01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					3.047.814											-								
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan		1		3.047.814	1	3.025.500	-	-	-	-	-	-	1		3.025.500	100	99,27				Kecamatan Abiansemai		
							Kegiatan																					
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100	99,27								
																	Predikat kinerja		ST	ST				SR	SR			
4	Terwujudnya masyarakat Kab.Badung yang aman, tertib dan sadar Hukum	1	0	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		18		99.999.881	-	-	-	-	18		8.835.254	18		64.070.436	18		72.905.690						
			02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					99.999.881																			
			01	Koordinasi (Sinergi) dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Desa yang dibina/dipantau		18		99.999.881	-	-	-	-	18		8.835.254	18		64.070.436	18		72.905.690	100	72,91		Kecamatan Abiansemai		
							Desa																					
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100	72,91								
																	Predikat Kinerja		ST	S					SR	SR		
5	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	1	0	Program Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum		7		2.163.000	-	-	-	-	7		1.055.750	-	-	7		1.055.750							
			01	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					2.163.000																	Kecamatan Abiansemai		
			03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah hari - hari besar yang diperingati		7		2.163.000	-	-	-	-	7		1.055.750			7		1.055.750	100	48,81					
							Kegiatan																					
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100	48,81								
																	Predikat Kinerja		ST	SR					SR	SR		
6	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	1	0	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		96		15.767.824	-	-	-	-	-	-	-	23		15.097.900	23		15.097.900						
			01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					15.767.824																			
			02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina		18		-	-	-	-	-	-	-	-	-											
							Desa																					
			06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pemilihan kepala desa		15		0	-	-	-	-	-	-	-	-											
							Desa																					
			09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang diverifikasi		18		12.283.187	-	-	-	-	-	-	-	18		11.803.500	18		11.803.500	100	96,09				
							Desa																					
			15	Facilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegakan Batas Desa	Jumlah buku profil dan monografi yang diterbitkan		5		3.484.637	-	-	-	-	-	-	-	5		3.294.400	5		3.294.400	100	94,54				
							Buku																					
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100	95,32								
																	Predikat Kinerja		ST	ST					SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									9.638.821.185											9.052.429.863								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		100	81,26								
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		ST	T					SR	SR		
1	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			376		8.073.507.125	90	1.233.207.486	94		2.241.007.689	88	1.298.770.947	12		2.005.867.488	282		6.778.853.610	75,00	83,96				
			2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.915.498		-		-	-	-	-			2.558.000									
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan RKA		2		8.901.297		-		-	-	-	-	2		2.558.000	2		2.558.000	100	28,74				
							Dokumen																					
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah		1		-		-		-	-	-	-			-		-	-						
							Paket																					
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya SAKIP Kantor Camat Petang		5		5.014.201				-	-	-	-												
							Dokumen																					



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17		
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.666.514.427		1.009.371.355		1.981.705.458		997.934.891		1.680.623.006		5.669.634.710							Kecamatan Petang		
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12	6.666.514.427	3	1.009.371.355	3	1.981.705.458	3	997.934.891	3	1.680.623.006	12	5.669.634.710	100	85,05							
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Bulan	188.360.977		18.942.500		43.435.570		32.710.000		17.167.000		112.255.070									
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan lampu penerangan jalan				1	7.218.435		-		-		-	1	2.575.000	1	2.575.000	100	35,67							
									Paket																				
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kelengkapan Administrasi atau Kebutuhan Alat Tulis Kantor				1	24.635.338		-	1	5.480.570		-	1	6.617.000	1	12.097.570	100	49,11							
									Paket																				
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan biaya untuk Upacara Keagamaan				1	123.087.500	1	8.037.500		27.050.000		29.075.000	1	7.975.000	1	72.137.500	100	58,61							
									Paket																				
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kelengkapan Administrasi kantor berupa Barang Cetak dan biaya Penggandaan				1	7.974.704		-		-		-		-	-	-	-	-							
									Paket																				
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan media cetak dan literatur di Kantor Camat Petang				324	25.445.000	81	10.905.000	81	10.905.000	81	3.635.000	-	-	243	25.445.000	75,00	100							
									Exemplar																				
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait					-		-		-		-		-	-	-	-								
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						930.028.223	163.003.631	163.745.561	248.078.456	231.292.482	806.126.130														
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Material/ Benda pos				12	3.000.000		-	6	1.890.000		-		6	1.890.000	50,00	63,00								
									Bulan																				
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya jasa telepon, listrik dan air				12	128.992.845	3	8.445.631	3	6.907.561	3	7.713.177	3	4.986.540	12	28.052.909	100	21,75							
									Bulan																				
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa kebersihan Kantor				1	798.033.378	1	154.558.000	-	154.948.000		240.365.279		226.305.942	1	776.177.221	100	97,26							
									Paket																				
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						274.690.000	41.890.000	52.121.100	20.047.600	74.227.000	188.285.700														
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor				1	218.410.000	1	41.890.000		52.121.100		4.995.600		68.691.000	1	167.697.700	100	76,78							
									Paket																				
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor				1	28.080.000		-		-		-	1	5.536.000	1	5.536.000	100	19,72							
									Paket																				
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk memperlancar Pelaksanaan tugas				1	28.200.000		-		-	1	15.052.000	-	-	1	15.052.000	100	53,38							
									Paket																				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		93,75	57,42			-	-	
																					Predikat kinerja		ST	R			SR	SR	
2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					17	469.686.567	3	92.560.000	3	92.560.000	3	145.004.168	7	133.365.224	16	463.489.392	94	194,99							
			02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.801.796		-						1.733.000											
			01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Rapat Koordinasi				4	1.801.796		-		-		-	4	1.733.000	4	1.733.000	100	96,18							
									Kali																				
			02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						467.884.771		92.560.000		92.560.000		145.004.168		131.632.224								Kecamatan Petang			
			01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dokumen surat usaha mikro dan kecil				1	543.971		-		-		-		-	-	-	-								
									Dokumen																				
			02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalam satu tahun				12	467.340.800	3	92.560.000	3	92.560.000	3	145.004.168	3	131.632.224	12	461.756.392	100	98,81							
									Bulan																				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100	97,49			-	-	
																					Predikat kinerja		ST	ST			SR	SR	
3	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					25	17.617.755	25	11.152.013	-	-	-	-	-	-	25	11.152.013	100	63							
			2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						17.617.755		11.152.013		-													Kecamatan Petang		
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan				25	17.617.755	25	11.152.013		-		-	-	-	25	11.152.013	100	63,30							
									Buku																				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100	63,30			-	-	
																					Predikat kinerja		ST	R			SR	SR	
4	Terwujudnya Masyarakat Kab. Badung yang aman, tertib dan sadar hukum	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					7	149.548.386	7	2.520.000	-	-	7	32.092.218	7	51.541.100	7	86.153.318	100	98							
			2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						149.548.386		2.520.000		-		32.092.218		51.541.100								Kecamatan Petang			

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG 5 TAHUN 2021

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab												
					K	Rp.	K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.										
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17																						
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu keuangan			100%	7.084.821.149	15%	1.057.894.701	26%	1.841.355.068	17%	1.237.624.242	26%	1.868.675.977	85%	6.005.549.988																				
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN tersedia		100	7.084.821.149	15	1.057.894.701	26	1.841.355.068	17	1.237.624.242	26	1.868.675.977	84	6.005.549.988	84,00	84,77																		
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			100%	62.455.810	28%	17.233.000	17%	10.539.000	21%	13.292.500	8%	5.187.700	74%	46.252.200																				
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik		75	2.329.500	-	-	-	-	-	-	75	1.404.700	75	1.404.700	100	60																		
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah barang barang milik daerah yang dikelola dengan baik		1	23.011.000	1	6.305.500	1	3.854.000	1	4.420.000	-	-	1	14.579.500	100,00	63,36																		
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak yang memadai		12	8.465.310	-	-	-	-	-	-	12	2.968.000	12	2.968.000	100	35																		
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		492	28.650.000	123	10.927.500	123	6.685.000	123	8.872.500	123	815.000	492	27.300.000	100,00	95,29																		
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah terselenggara dengan baik		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta tersedianya ATK dan material			100%	13.481.059	2%	302.654	2%	211.448	3%	354.117	34%	4.542.480	40%	5.410.699																				
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan administrasi keuangan dilaksanakan tepat waktu		600	11.082.709	-	-	-	-	-	-	39	4.335.700	39	4.335.700	7	39																		
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi		100	2.398.350	13	302.654	9	211.448	15	354.117	9	206.780	46	1.074.999	46,00	44,82																		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai			100%	248.262.936	12%	30.179.700	17%	42.148.100	17%	41.656.200	24%	60.560.500	70%	174.544.500																				
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan yang dikelola dengan baik dan layak jalan		17	248.262.936	12	30.179.700	17	42.148.100	17	41.656.200	24	60.560.500	24	174.544.500	141,18	70,31																		
							unit																															
Rata-rata capaian kinerja (%)																	87,77	66,91																				
Predikat kinerja																	T	S																				
2	Mantapnya Stabilitas Politik	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik			100%	3.047.024.683	-	-	-	-	-	-	100%	3.045.974.392	100	3.045.974.392	100	100																		
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tercapainya Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Perwakilan dan Partai Politik, serta Pemantauan Situasi Politik			100%	3.047.024.683	-	-	-	-	-	-	100%	3.045.974.392	100	3.045.974.392																				
		03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepada Partai Politik			100	3.047.024.683	-	-	-	-	-	-	100	3.045.974.392	100	3.045.974.392	100	100																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100	100																				
Predikat kinerja																	ST	ST																				
3	Terpeliharanya Persatuan	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kegiatan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial			100%	338.197.793	-	-	25%	84.000.000	25%	84.000.000	50%	170.014.990	100%	338.014.990	100	100																		
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung			100%	338.197.793	-	-	25%	84.000.000	25%	84.000.000	50%	170.014.990	100%	338.014.990																				
		06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Tim Pengawasan Situasi Daerah Badung			1	338.197.793	-	-	1	84.000.000	1	84.000.000	1	170.014.990	1	338.014.990	100	100	-	-	-	-	-	-												
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100	100																				
Predikat kinerja																	ST	ST																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								10.804.092.486									9.624.158.369																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	95,92	88,94																				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	ST	T																				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH																	81,46	66,07																				
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH																	T	S																				

Mangupura, 31 Januari 2021  
Dievaluasi  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BADUNG

I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670127 199201 1 001